

**PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS DAN
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA SMP NEGERI DI KECAMATAN
PALU UTARA KOTA PALU**



Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Megister
dalam Bidang Pendidikan Kepengawasan Pendidikan Agama Islam
pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HERMAN

NIM: 80100212131

Promotor:

Prof. Dr. H. Nasir A. Baki, M.A.

Kopromotor:

Drs. Muh. Wayong, M. Ed.M., Ph.D.

**PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

ABSTRAK

Nama : Herman.
Nim : 80100212131
Konsentrasi : Pendidikan Kepengawasan PAI
Judul : Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas dan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu

Tesis ini menggambarkan kondisi obyektif pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu. Menggambarkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, mengidentifikasi dan menemukan factor pendukung dan penghambat pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu serta solusinya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan keilmuan yang meliputi pendekatan teologis normatif, pedagogis, psikologis, dan, pendekatan manajerial. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang terdiri atas data pengawas, kepala sekolah, dan guru, sarana dan prasarana Pendidikan, asip silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), absen pengawas dan lain-lain yang di anggap dapat mendukung hasil penelitian ini. Instrumen penelitian menggunakan panduan observasi, pedoman wawancara, dan *check list* dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Adapun pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan tiangulasi waktu.

Melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data maka ditemukan hasil penelitian bahwa proses penerapan kompetensi supervisi akademik pengawas dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, jika dilihat dari aspek program perencanaan sudah termasuk baik karena sebelum melakukan kegiatan supervisi, pengawas terlebih dahulu membuat suatu perencanaan, misalnya melakukan kesepakatan dengan pihak sekolah yang akan disupervisi sehingga ada persiapan. Adapun faktor pendukung proses penerapan kompetensi supervisi akademik pengawas dalapembinaan guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, yaitu kualifikasi akademik dan fasilitas pengawas tersebut. Sementara faktor penghambatnya yaitu rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh pengawas. Sementara solusi faktor penghambatnya, yaitu peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik serta perekrutan pengawas secara selektif. Kemudian hasil proses penerapan kompetensi supervisi akademik pengawas dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu belum optimal sehingga tetap harus lebih ditingkatkan lagi terutama pada aspek pelaksanaan dan penilaian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama khusus bidang Pendidikan Agama

Islam, baik menyangkut perekrutan pengawas, pemerataan penempatan pengawas, maupun peningkatan intensitas pembinaan pengawas. Diharapkan dapat menjadi koreksi internal pengawas dan dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai kompetensi supervisi akademik pengawas dalam pembinaan guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, Demi untuk mendapatkan pengawas yang berkompeten dan profesional, hendaknya pihak yang berwenang merekrut pengawas sesuai dengan regulasi yang berlaku.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan supervisi akademik pengawas sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru. Adanya pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas maka guru memiliki peluang untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Pelaksanaan supervisi akademik, pengawas mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kepada guru, khususnya dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Oleh karena itu, kehadiran seorang pengawas sangat diharapkan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru.

Sutisna dalam Syaiful Sagala mengemukakan bahwa supervisi sebagai segala usaha yang diarahkan kepada penyediaan kepemimpinan bagi para guru dan tenaga kependidikan lain dalam perbaikan pengajaran, melibatkan stimulus pertumbuhan profesional dan perkembangan dari para guru, seleksi dan revisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode mengajar, dan evaluasi pengajaran.¹

Pekerjaan pengawas adalah pekerjaan mulia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan terencana untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, melaksanakan kepengawasan dapat berarti menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jabatan pengawas adalah jabatan amanah, amanah dari Allah swt., amanah pemerintah, dan amanah masyarakat. Amanah

¹Lihat Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 229.

tersebut mutlak harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā'/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pendidikan yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²

Ayat di atas menjelaskan bahwa pengawas yaitu pekerjaan profesional sekaligus amanah yang harus dilakukan secara optimal untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas maka diperlukan keprofesionalan pengawas yang dapat melihat secara cermat terhadap permasalahan peningkatan kualitas pendidikan.

Secara operasionalnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memberi arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi: 1) Standar isi, 2) Standar proses, 3) Standar kompetensi lulusan, 4) Standar Pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan dan 8) standar penilaian.³

Salah satu unsur penentu dalam keberhasilan sebuah proses pembelajaran adalah kemampuan guru dalam mengelola kelas. Tingkat kreativitas guru dan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Qomari, 2010), h. 87.

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

inovasi yang dibangun dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan turut menunjang tercapainya kompetensi dasar bagi peserta didik. Dari sisi ini, profesionalitas guru diuji demi keberhasilan peserta didik. Semangat kerja guru pun dipertaruhkan dalam keberlangsungan proses pembelajaran. Artinya, guru harus memiliki kompetensi yang secara konseptual menurut Hamzah B.uno ada tiga indikator kompetensi yaitu yang berhubungan dengan tugas profesionalnya sebagai guru, berhubungan dengan pribadinya, dan berhubungan dengan masyarakat atau lingkungannya.⁴

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, guru dan pengawas dituntut keprofesionalannya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang kompetensi pengawas. Guru sebagai penjamin mutu pendidikan diruang kelas, sementara pengawas adalah penjamin mutu pendidikan dalam area yang lebih luas pada tingkat madrasah. Guru adalah ujung tombak pendidikan di sekolah. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas guru sudah seharusnya menjadi bagian rencana strategis dan masuk dalam kelompok prioritas utama. Jika kualitas diri guru meningkat, otomatis kualitas pendidikan meningkat, begitu juga dengan outputnya.⁵

Mengingat begitu pentingnya peranan guru dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, selayaknyalah bila kemampuan guru ditingkatkan melalui program pembinaan secara terus menerus agar guru memiliki kemampuan sesuai

⁴Lihat Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan; Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 72.

⁵Lihat Moh. Saroni, *Personal Branding Guru* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 9.

tuntutan profesional. Salah satu cara untuk melakukan pembinaan profesionalitas kinerja guru dalam bidang akademik perlu dilakukan kegiatan supervisi akademik di sekolah oleh pengawas akademik profesional. Pandangan penulis tersebut diperkuat dengan pendapat Ali Imron bahwa guru perlu di supervisi terus kemampuan profesionalnya. Sebab, dengan supervisi yang terus menerus, mereka akan memutakhirkan kemampuan profesionalnya. Secara konseptual hal tersebut dibenarkan dan terbukti secara empirik.⁶

Dadang Suhardan menyatakan bahwa, "Usaha apapun yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi jalannya pendidikan untuk mendongkrak kualitas, bila tidak ditindak lanjuti dengan pembinaan gurunya, tidak berdampak nyata pada kegiatan layanan belajar di kelas. Kegiatan pembinaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap usaha peningkatan mutu pembelajaran."⁷

Peranan kepengawasan satuan pendidikan di dalam pembinaan profesional guru sangat signifikan dalam efektivitas dan kualitas kinerja guru. Masalah dukungan kemudian dan faktor rintangan pelaksanaan pemberian bantuan profesional kepada guru tampaknya disadari sebagai sesuatu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari seluruh keberhasilan kegiatan upaya peningkatan mutu pembelajaran yang harus diatasi.

Profesionalitas yang dimiliki oleh pengawas PAI ikut mendukung terciptanya suasana kondusif bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Pengawas merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam membina

⁶ Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 6.

⁷ Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 12.

kemampuan profesional tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas kinerja sekolah. Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang akademik dan bidang manajerial pada setiap satuan pendidikan.

Sahertian berpendapat bahwa sebagai pengawas akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran, sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif. Pembinaan dan supervisi kedua aspek tersebut hendaknya menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Oleh karena itu, pengawas harus lebih unggul dari kepala sekolah/kepala madrasah dan guru.⁸

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa supervisi adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi man-mana hal yang sudah baik, mana yang belum baik, dengan maksud memberi pembinaan kepada guru. Supervisi adalah kegiatan pembinaan kepada sekolah pada umumnya dan guru pada khususnya agar kualitas pembelajarannya meningkat. Selanjutnya Sharsimi Arikunto mengatakan pula bahwa sesuai dengan konsep pengertiannya supervisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) supervisi akademik adalah supervisi yang menitikberatkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses belajar, dan 2) supervisi administrasi yang menitikberatkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.⁹

⁸Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Sumber daya Manusia* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 18.

⁹Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Supervisi* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 33.

Pendapat tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung harus diakui bahwa guru harus profesional dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagai pendidik. Keberhasilan pelaksanaan berbagai perubahan yang diarahkan untuk memperbaiki proses pembelajaran tidak dapat mengandalkan pada pengawas saja tapi juga kinerja dan inovatif guru.

Keberhasilan pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus ditunjang oleh kemampuan dalam berbagai aspek, baik dari segi kualifikasi maupun kompetensi. Menjadi seorang pengawas profesional bukan suatu hal yang mudah karena ada beberapa kriteria yang harus dimiliki.

Indikator pengawas yang profesional dalam peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditegaskan bahwa, harus memiliki kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi. Sedangkan dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas sekolah/madrasah ditetapkan bahwa kompetensi pengawas sekolah/madrasah terdiri atas enam dimensi kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa pengawas akademik adalah bantuan profesional kesejawatan yang dilakukan pengawas sekolah melalui dialog kajian masalah pendidikan dengan menggunakan teknik-teknik supervisi atau pengembangan untuk menemukan solusi, atau berbagai alternatif pengembangan

¹⁰Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 *Tentang Standar Pengawas Sekolah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 4-6.

dalam upaya peningkatan kemampuan profesional dan komitmen guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya guna mempertinggi prestasi belajar peserta didik, dan kinerja sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, efesiensi dan akuntabilitas pendidikan. Karena begitu, kontrol dan inspeksi dalam praktik pengawasan hanya diperlukan batas-batas tertentu, yang lebih utama terletak pada supervisi akademik.¹¹

Terkait dengan hal tersebut, Robbins mengemukakan bahwa supervisi yang dilakukan pengawas merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.¹²

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kualifikasi dan kompetensi pengawas belum sesuai dengan yang diharapkan. Tidak jarang para pengawas mengakui bahwa wawasan akademiknya berada di bawah guru dan kepala sekolah, sebab mereka tidak pernah disentuh dengan inovasi baru yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Pandong berpendapat bahwa tenaga pengawas kurang diminati, sebab rekrutmen pengawas bukan karena prestasi tetapi semacam tenaga buangan dari kepala sekolah dan guru atau tenaga struktural yang memperpanjang masa pensiun.¹³

¹¹ Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 157.

¹² S.P. Robbins, *Management: Concepts and Practices* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1997), h. 27.

¹³ A. Pandong, *Tugas pokok dan Fungsi Pengawas* (Badan Dilat Depdagri dan Diklat Depdiknas, 2003), h. 8.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, ditemukan fakta empiris bahwa pelaksanaan supervisi akademik pengawas belum efektif. Hal ini terlihat dari frekuensi kehadiran pengawas dalam melakukan supervisi akademik terhadap guru Pendidikan Agama Islam, rata-rata hanya sekali dalam satu semester sehingga durasi waktu untuk membimbing guru dalam kegiatan pembelajaran seperti penyusunan silabus, RPP, penggunaan metode dan media pembelajaran sangat terbatas. Dengan begitu maka berimplikasi pada kompetensi profesional guru yang rendah, seperti kurangnya kemampuan guru dalam penguasaan materi ajar, KI, KD, kurangnya kemampuan mengembangkan materi ajar, dan pemanfaatan media pembelajaran yang terkait dengan teknologi informasi.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam tesis ini yaitu:

- a. Pelaksanaan supervisi akademik pengawas yang meliputi pembimbingan penyusunan silabus, RPP, penggunaan metode, dan media pembelajaran.
- b. Kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam yang meliputi kemampuan guru dalam menguasai materi ajar, kemampuan guru dalam menguasai KI dan KD, kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar, dan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi informasi.

Terkait dengan fokus penelitian dan deskripsi fokus tersebut maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 1.1. Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Pelaksanaan supervisi akademik pengawas	1. Membimbing guru menyusun silabus 2. Membimbing guru menyusun RPP 3. Membimbing guru menggunakan metode pembelajaran 4. Membimbing guru menggunakan media pembelajaran
Kompetensi Profesional guru Pendidikan Agama Islam	1. Penguasaan materi ajar 2. Penguasaan KI dan KD 3. Pengembangan materi ajar 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dijadikan kajian utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu? Untuk mengkaji pokok permasalahan tersebut maka penulis merinci ke dalam beberapa submasalah yaitu:

1. Bagaimana kondisi objektif pelaksanaan supervisi akademik pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu?

2. Bagaimana gambaran kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu?

D. Kajian Pustaka

Secara spesifik penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ada penelitian yang membahas tentang topik ini pada objek penelitian yang sama. Meskipun demikian dalam beberapa literatur, ditemukan beberapa sumber pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian ini di antaranya:

Ahsan dengan judul tesis “Peranan pelaksanaan supervisi pendidikan dalam meningkatkan kinerja guru pada MTS al-Azhar Mannati Kab. Sinjai”.¹⁴ ditemukan bahwa *pertama* supervisi yang dilakukan pengawas sekolah tidak mempunyai hubungan signifikan terhadap kinerja profesional guru. Implikasi dari hasil penelitian tersebut adalah perlunya pengawas memperhatikan pedoman-pedoman kerja yang ada agar kinerjanya lebih baik. *Kedua* supervisi yang dilaksanakan pengawas sekolah termasuk dalam kategori rendah.

Idris dengan judul tesis “Pengaruh Supervisi Terhadap Peningkatan Kemampuan Profesionalisme Guru pada Madrasah Aliyah di Watampone”.¹⁵ hasil

¹⁴Ahsan, “Peranan Pelaksanaan Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Kinerja Guru pada MTs al-Azhar Mannanti Kab. Sinjai”, *Tesis*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2008.

¹⁵Idris, “Pengaruh Supervisi Terhadap Peningkatan Kemampuan Profesionalisme Guru pada Madrasah Aliyah di Watampone”, *Tesis*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2008.

penelitiannya sebagai berikut: *pertama* pengaruh supervisi pendidikan dalam meningkatkan kemampuan profesional guru pada MAN 2 dan MAN 1 di Watampone sangat besar utamanya dalam mengelola kegiatan belajar mengajar yang akan berdampak pada proses belajar siswa yang efektif dan efisien, dengan tujuan akhir dari program tersebut ialah meningkatkan kualitas pendidikan yang diinginkan, serta menjadikan Madrasah Aliyah di Watampone sebagai Aliyah yang bermutu (*excellent school*); *kedua* faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya peningkatan kemampuan profesional guru pada MAN Watampone adalah *pertama* faktor pengembangan kemampuan profesional guru yang meliputi kemampuan guru dalam menguasai kurikulum materi pelajaran, kemampuan dalam menggunakan metode dan sarana dalam proses pembelajaran, melaksanakan penilaian dan hasil belajar dan kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, disiplin dan komitmen dalam tugasnya. *Kedua* pemanfaatan lingkungan, prasarana dan sarana yang meliputi peningkatan kebersihan, keindahan, keamanan, kesehatan dan pelestarian lingkungan serta pemanfaatan sebagai sumber dan alat belajar; *ketiga* kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kemampuan profesional guru melalui supervisi pendidikan adalah sebagai berikut: *pertama*, sumber daya manusia utamanya para supervisor kurang memadai, *kedua* tanggung jawab para supervisor dalam melaksanakan tugas belum maksimal dan *ketiga* terbatasnya dana/finansial utamanya dalam mendukung pelaksanaan program-program kerja yang telah direncanakan; *keempat* solusi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kemampuan profesionalisme melalui supervisi pendidikan adalah meningkatkan sumber daya guru dan para supervisor dan mengaktifkan keberadaan para supervisor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta tersedianya dana yang maksimal sehingga program demi program dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Efektivitas pelaksanaan supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kab. Sinjai, Arsyad Parenrengi.¹⁶ Hasil temuannya adalah: *pertama* pelaksanaan supervisi pendidikan yang baik dan efisien dapat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan, hal ini terlihat dari meningkatnya kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja pegawai lainnya; *kedua* peningkatan kinerja pengawas pendidikan sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Adirun T. Ali dengan judul tesis “Peranan pengawas dalam meningkatkan kompetensi Guru pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Provinsi Gorontalo.”¹⁷ Adapun penelitiannya meliputi wawasan dasar pengawas, langkah-langkah yang dilakukan pengawas dalam menciptakan kompetensi guru, kinerja pengawas pada madrasah Aliyah serta dampak kinerja pengawas terhadap kompetensi guru PAI.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, setelah dianalisis belum ada yang secara spesifik meneliti tentang pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu; terlebih lagi jika menunjuk objek penelitian pada satu institusi pendidikan formal, namun demikian tulisan-tulisan itulah yang menjadi referensi utama, inspirasi dan ilustrasi pemikiran sekaligus sebagai sumber informasi dalam memunculkan ide-ide kreatifitas dalam mengkaji secara objektif tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Subtansi dari penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang akan

¹⁶Arsyad Parenrengi, “Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kab. Sinjai”, *Tesis*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2008.

¹⁷Adirun T. Ali, “Peranan pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah di Provinsi Gorontalo”, *Disertasi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012.

melihat secara detail dan sistemik mengenai pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari segi materi, objek maupun metode pembahasannya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menggambarkan kondisi objektif pelaksanaan supervisi akademik pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu.
- b. Menggambarkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu.
- c. Mengidentifikasi dan menemukan peluang dan tantangan pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu serta solusinya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang berpotensi sebagai pengawas dan guru pada khususnya. Selain itu, diharapkan pula dengan penelitian ini dapat menambah khasanah intelektual yang seiring dengan dinamika pengembangan lembaga-lembaga pendidikan dalam

hubungannya dengan pengembangan profesi pengawas pada proses pendidikan di sekolah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak pelaksana pendidikan, terutama bagi tenaga pengawas agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan peranan pengawas secara umum pada proses pendidikan pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Supervisi Akademik Pengawas

1. Pengertian Supervisi Akademik Pengawas.

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh mengenai supervisi akademik pengawas maka perlu dipahami terlebih tentang pengertian supervisi akademik itu sendiri.

Supervisi berasal dari bahasa Inggris *supervision*,¹ terdiri atas dua kata, yaitu *super* artinya lebih atau atas dan *vision* artinya melihat atau meninjau. Secara etimologis supervisi artinya melihat atau meninjau yang dilakukan oleh atasan terhadap pelaksanaan kegiatan bawahannya.² Kata supervisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pengawasan utama; pengontrolan tertinggi; penyeliaan.³

Istilah supervisi secara umum berarti mengamati, mengawasi atau membimbing dan menstimulir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk mengadakan perbaikan. Konsep supervisi didasarkan atas keyakinan bahwa perbaikan merupakan suatu usaha yang kooperatif dari semua orang yang berpartisipasi dan supervisor sebagai pemimpin, yang juga bertindak

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia; An English-Indonesian Dictionary* (Cet. XXX; Jakarta: Gramedia, 2008), h. 569.

²Mukhtar dan Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 41.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Ed. IV; Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1359.

sebagai stimulator, pembimbing, dan konsultan bagi para bawahannya dalam rangka upaya perbaikan.⁴

Pengertian secara etimologis tersebut membawa implikasi bahwa seolah-olah supervisi disamakan dengan pengawasan atau inspeksi yang umum berlaku, terutama dalam dunia pendidikan. Supervisi pendidikan atau supervisi sekolah diasumsikan sebagai kegiatan mendeteksi kesalahan dari bawahan dalam melaksanakan perintah serta peraturan-peraturan dari atasan. Kesalahan dalam melaksanakannya dipandang sebagai suatu hal yang harus mendapatkan hukuman yang dikenal dengan nama hukuman administratif. Tetapi sebenarnya kegiatan supervisi itu dilakukan oleh orang tertentu yang disebut dengan supervisor yang pada hakikatnya juga pemimpin pendidikan untuk menilai kemampuan guru maupun tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, serta melakukan teguran-teguran atau perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan atau memberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami bawahannya.⁵

Supervisi pendidikan merupakan suatu usaha mengkoordinasi dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individu maupun kelompok. Hakekatnya segenap bantuan yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pengajaran. Supervisi pembelajaran modern perlu dimaknai dan diaplikasikan dengan baik seperti yang dikemukakan oleh Neagley dan Evans yang dikutip Sahertian bahwa:

Supervisi adalah untuk melayani dan membantu guru dalam hal pengembangan pembelajaran dan kurikulum. Tampaknya pengawas masih mengikuti pola lama dengan banyak melakukan koreksi atau mencari kesalahan guru. Padahal

⁴Departemen Agama RI., *Kepengawasan Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 2.

⁵Mukhtar dan Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, h. 41.

tidak semua guru melakukan kesalahan, melainkan ada guru yang perlu diberi dorongan dan penguatan agar bisa berkembang dan bukan dihambat. Jika perlu mereka hendaknya diberikan kesempatan melakukan supervisi sesama teman guru, atau dalam istilah supervisi adalah supervisi kolegial atau supervisi kesejawatan.⁶

Supervisi sesungguhnya memiliki pengertian yang luas. Suryasubrata mengemukakan bahwa supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.⁷

Sergiovanni sebagaimana dikutip Mukhtar mengemukakan pernyataan yang berhubungan dengan supervisi sebagai berikut: (1) supervisi lebih bersifat proses dari pada peranan, (2) supervisi adalah suatu proses yang digunakan oleh personalia sekolah yang bertanggungjawab terhadap aspek-aspek tujuan sekolah dan yang bergantung secara langsung kepada para personalia yang lain, untuk menolong mereka menyelesaikan tujuan sekolah itu.⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa supervisi itu bukanlah peranan tetapi merupakan sebuah proses pencapaian tujuan pembelajaran.

Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor yang berarti pengawas atau pengamat.⁹ Dan istilah pendidikan disebut orang yang memberikan bantuan khusus kepada guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik.¹⁰ Dadang Suhardan mengemukakan bahwa pengawas atau supervisor adalah seorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya, ia bertindak atas dasar

⁶P. A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 19.

⁷Suryasubrata, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h. 125.

⁸ Mukhtar dan Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, h. 42.

⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, h. 569.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1107.

kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ia membina peningkatan mutu akademik yang berhubungan dengan usaha-usaha menciptakan kondisi belajar yang lebih baik berupa aspek akademis bukan masalah fisik material.¹¹

Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 dicantumkan bahwa Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.¹² Hal senada tertuang juga dalam Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 381 Tahun 1999 tanggal 29 Juli 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya.¹³

Mengacu pada SK MENPAN tersebut, pengawas di lingkungan Kementerian Agama diberi istilah "Pengawas Pendidikan Agama Islam" sehingga pengertiannya menjadi lebih spesifik yaitu Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawas terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan

¹¹Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah* (Cet. III ; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 36.

¹²Departemen Agama RI., *Pedoman Rekrutmen Calon Pengawas* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004), h. 85.

¹³Departemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 6.

penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.¹⁴

Pelaksanaan supervisi akademik pengawas, khususnya dalam melakukan pembinaan pada dasarnya harus mengacu pada silabus dan perencanaan program pembelajaran yang telah dibuat sendiri oleh guru berdasarkan pengembangan situasi dan kondisi di sekolah prakteknya pengawas harus mampu mereview atau memperbaiki silabus dan RPP yang telah disusun oleh guru tersebut. Pengawas mampu menempatkan model dan strategi mengajar yang tepat untuk mencapai kompetensi yang tertuang dalam RPP guru. Kemudian pengawas mampu memperhatikan keragaman potensi peserta didiknya.

Hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menjaga agar kualitas pendidikan terus mengalami kemajuan yang dibuktikan dengan *output* yang terlihat dengan kenyataan bahwa kemajuan prestasi akademik peserta didik makin meningkat dari tahun sebelumnya. Itu mengindikasikan bahwa suatu sistem pendidikan walaupun ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai serta pembiayaan yang cukup, jika tidak menghasilkan luaran mutu yang berkualitas maka mutu dan kualitas pasti mengalami kemunduran dan bermutu rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, *output* dari program pembelajaran adalah kemajuan peserta didik, perkembangan kemajuan tersebut meliputi tiga aspek yaitu:

¹⁴Departemen Agama RI, *Panduan Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 7.

- 1) Kemampuan intelektual, yang terdiri dual hal, yaitu yang bersifat akademik seperti pengetahuan matematika, bahasa, dan bersifat non akademik seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir analisis;
- 2) Watak atau karakteristik pribadi, yang terdiri dari dua hal, yaitu bersifat normatif seperti keimanan, kejujuran, kesopanan, dan lainnya, serta bersifat non normatif seperti kematangan, emosi, sikap ilmiah, keinginan berprestasi, senang bertanya, dan sebagainya;
- 3) Kemampuan praktis, terdiri dari dua jenis, yaitu kemampuan yang memerlukan koordinasi antara panca indra dengan gerakan otot yang bersifat fisik maupun yang berkenaan dengan profesi dan tugas tertentu, dan keterampilan sosial yang kompleks seperti memimpin rapat, mengkoordinasikan kegiatan, mempengaruhi orang lain.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kemampuan intelektual yang bersifat akademik adalah tingkat penguasaan peserta didik terhadap mata pelajaran yang diajarkan dan dijadikan bekal, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun untuk mendalami bidang tersebut pada masa akan datang. Demikian halnya dengan kemampuan non akademik bahwa sebagai manusia yang hidup tanpa keberadaan orang lain maka yang perlu dikembangkan adalah kreativitas, berpikir kritis terhadap problematika sosial, dan analisis terhadap kebutuhan diri dan lingkungan sekitar yang mengarah kepada perkembangan pribadi seseorang. Watak dan karakteristik pribadi mengandung makna sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang perlu meyakini bahwa manusia adalah salah satu ciptaan-Nya, dengan demikian rasa

¹⁵Departemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama di Sekolah Umum, 2005), h. 55-56.

keimanan tumbuh dalam diri sehingga dalam kehidupan sehari-hari perilaku selalu terkontrol untuk selalu bersikap jujur, menghormati orang lain. Berawal dari keimanan itu pula maka sikap spritual diri selalu terjaga. Keterampilan praktis dapat dipahami sebagai tugas dan tanggung jawab selalu ada pada setiap manusia, dan kehidupan akan merasa sempurna jika tugas dan tanggung jawab itu terpenuhi. Kegiatan akan terpenuhi jika selalu melibatkan orang dalam segala urusan yang sifatnya birokrasi dan memerlukan bantuan orang lain, ini yang dimaksud sikap sosial, artinya kemampuan pendayagunaan dan mempengaruhi orang lain dalam hal yang positif agar tujuan tercapai. Tentunya koordinasi perlu dibangun dan perencanaan disusun sedemikian rupa agar apa yang direncanakan terwujud.

Demikian pula pada aspek pengawasan akademik, kemampuan guru menyajikan pembelajaran, kematangan peserta didik menerima pelajaran, dan kemampuan sekolah dalam memenej pendidikan di lingkungannya akan berimplikasi kepada peningkatan kualitas guru dan peningkatan mutu peserta didik terjamin.

Berkaitan denga hal itu maka ada dua jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka menjamin bahwa setiap lulusan yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar mutu yang ditetapkan, khususnya dalam penguasaan bidang akademik (mata pelajaran) yang diajarkan, yaitu:

- a) Menetapkan sistem belajar tuntas (*mastery learning*) yaitu pembelajaran dimana guru melanjutkan pengajaran ke kompetensi dasar selanjutnya jika seluruh atau sebagian besar peserta didiknya menguasai standar kompetensi yang diajarkan. Jika hal ini benar-benar diterapkan maka peserta didik telah menyelesaikan seluruh pelajarannya. Kegiatan ini disebut *quality assurance*;
- b) Pengecekan akhir sebelum peserta didik dinyatakan lulus, yaitu mengadakan ujian akhir. Ujian akhir berkenaan dengan standar kompetensi yang esensial saja,

karena waktu yang terbatas. Selain itu untuk mengecek apakah peserta didik telah menguasai kompetensi dasar yang telah dipelajari atau telah upaya tambahan (remedial) untuk menguasainya. Hal ini mengingat bahwa sangat jarang terjadi di mana seluruh peserta didik menguasai seluruh isi pelajaran. Kegiatan ujian akhir ini disebut *quality control*.¹⁶

Supervisi akademik diarahkan untuk memperbaiki kinerja guru secara totalitas berkaitan dengan tugas-tugas keguruan. Kinerja guru tersebut merupakan modal dasar pembentukan watak dan prestasi peserta didik yang tercermin melalui perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru melalui silabus, RPP, penyajian pembelajaran, dan sebagainya. Pelayanan pembinaan itulah merupakan usaha preventif pengawas untuk mencegah agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang tidak perlu pada masa-masa mendatang.

Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses pembelajaran, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap peserta didik yang sedang belajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki, apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam bentuk pembinaan.¹⁷

Supervisi akademik adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pembinaan dan penyegaran terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang mencakup:

¹⁶Depertemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan*, h. 3.

¹⁷Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 39.

- (1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
- (2) Memahami konsep prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/pembimbingan tiap mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis;
- (3) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan tiap mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar dan prinsip pengembangan KTSP.
- (4) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi, atau teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik;
- (5) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis;
- (6) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas dan/di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis;
- (7) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran tiap bidang mata pelajaran dan rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis.

- (8) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan disekolah yang sejenis.¹⁸

Mengacu pada uraian tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kompetensi yang harus dicapai oleh pengawas tersebut mengarahkan guru pada keterampilan dan strategi serta petunjuk ke arah perbaikan dan pencapaian kualitas guru dalam hal penyusunan silabus, perencanaan pembelajaran (RPP), penyajian mata pelajaran, strategi, metode, dan teknik penyajian pembelajaran; penyajian mata pelajaran di kelas, penggunaan media, dan pengelolaan, perawatan dan pemanfaatan fasilitas. Semua itu dimaksudkan untuk pembinaan kepada guru oleh pengawas agar dapat mencapai prestasi peserta didik yang gemilang. Termasuk dalam ruang lingkup supervisi akademik adalah supervisi pendidikan yang sasarannya adalah peningkatan kualitas guru untuk meningkatkan perbaikan layanan kepada peserta didik dalam segala hal yang berkaitan dengan arah dan tujuan pendidikan termasuk strategi, metode, dan teknik penyajian materi ajar di dalam dan di luar kelas.

Buku kepengawasan pendidikan, menjelaskan bahwa supervisi pendidikan atau pengawasan pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pembelajaran di kelas pada khususnya.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa, kepengawasan pendidikan atau supervisi akademik dapat diartikan sebagai kegiatan

¹⁸ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 23-24.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan*, h. 3.

pengawasan dan pembinaan baik berkaitan dengan teknis pendidikan maupun teknis administrasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

Perspektif kebijakan, kepengawasan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan berubahnya filosofi dan sistem manajemen pemerintahan. Landasan yuridis formal pengawasan pendidikan saat ini merujuk pada SK Menpan RI Nomor 9/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.²⁰

Sasaran supervisi pendidikan adalah kegiatan pengawas ditujukan kepada situasi pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, sasaran utama dari pengawasan pendidikan adalah pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti pengelolaan kelas, pengelolaan sekolah, pengelolaan administrasi kurikulum, pelaksanaan bimbingan, ketersediaan fasilitas pendukung pendidikan dan pengajaran serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

Kemampuan pengawas dalam bidang akademik akan menjamin guru yang menjadi binaannya dapat dibantu memecahkan masalah-masalah berkaitan dengan hal mengajar maupun yang berhubungan dengan pembelajaran seperti: penyusunan program, penyusunan silabus, pembuatan RPP, penyajian materi pelajaran, yang ada kaitannya dengan peningkatan mutu guru PAI dan peningkatan kualitas peserta didik.

²⁰Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 224.

Adapun pengertian pengawas, secara etimologi, kata pengawasan atau supervisi merupakan istilah dalam bahasa Inggris *supervision*, terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *super* dan *vision* yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan orang yang melakukan supervisi dikenal dengan supervisor. Kata pengawas mengandung arti “suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.”²¹ Dalam perkembangan supervisi pengawasan dikenal dengan istilah supervisor yakni menemukan cara-cara bekerja secara kooperatif yang efektif. Pada dunia pendidikan modern ini supervisi bukan lagi suatu pekerjaan yang dipegang oleh seorang petugas, melainkan pekerjaan bersama yang dikoordinasikan oleh semua pihak yang terkait. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berarti penilaian dan penjagaan.²²

Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan yaitu *monitoring*, *correcting*, *evaluating*, dan *supervision*. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembinaan, dan penelusuran terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara riil merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan.²³ Pengawasan bermakna juga suatu kegiatan untuk melakukan

²¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 154-155.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1051.

²³Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, h. 219.

pengamatan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.²⁴ Oleh karena itu kegiatan supervisi pendidikan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai disiplin ilmu kepengawasan apalagi orang tersebut tidak dipersiapkan terlebih dahulu untuk diproyeksikan menjadi pengawas.

B. Indikator Supervisi Akademik Pengawas

Istilah supervisi akademik sama maksudnya dengan supervisi pendidikan, yang menjadi fokusnya adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan mutu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok melalui bimbingan dan konsultasi dialog profesional. Ada beberapa Indikator pelaksanaan supervisi akademik pengawas menurut Ofsted sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Kadim Masaong yaitu meliputi:

1. Melakukan pembimbingan kepada guru dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
2. Melakukan kegiatan pembimbingan terhadap guru dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran.
3. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang pengawas diharapkan mampu melakukan pembimbingan kepada guru dalam kaitannya dengan penggunaan berbagai media pembelajaran.²⁵

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pelaksanaan supervisi akademik, memiliki cakupan yang sangat luas sehingga dalam

²⁴E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 155.

²⁵Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 23-24.

pengawasan akademik, seorang pengawas harus memiliki berbagai macam kemampuan dan keahlian, khususnya dalam melaksanakan supervisi akademik pengawas.

Pengawasan pendidikan harus dilaksanakan oleh orang yang sesuai dengan keahliannya. Pekerjaan supervisi adalah pekerjaan profesional dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada pelaksana pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam hal ini tenaga pendidik. Menurut Oteng Sutisna bahwa supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didiknya, supervisi hadir karena satu alasan untuk memperbaiki pembelajaran.²⁶ Teori ini mengandung makna bahwa kehadiran pengawas adalah untuk membina, agar guru lebih kreatif dan memiliki kecakapan profesional melaksanakan tugas dengan baik, karena guru yang memiliki kreativitas dalam mengelola pembelajaran akan berdampak positif terhadap peserta didiknya, sebab supervisi mendorong guru untuk lebih berdaya sehingga situasi pembelajaran menjadi lebih baik, pembelajaran berlangsung efektif sehingga guru merasa senang dan puas dalam melaksanakan tugasnya.

Konsep pengawasan dalam Islam telah ditegaskan dalam QS al-Fajr/89:14.

Terjemahnya:  إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.²⁷

Ayat di atas mengandung makna bahwa manusia pada hakikatnya memerlukan pengawasan/koreksi dari orang lain agar senantiasa konsisten atau istiqamah

²⁶ Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional* (Bandung: Angkasa, 1982), h. 58.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 593.

menjaga amal ibadahnya, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah secara fisik dan psikis (mental), terutama lemah dalam pengendalian diri.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 2010 bahwa Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.²⁸ Selanjut menurut Dadang Suhardan bahwa supervisor yaitu orang yang melakukan supervisi. Ia seorang pengawas pendidikan, atau kepala sekolah yang karena peranannya sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab tentang mutu program pengajaran di sekolahnya, atau seorang petugas khusus yang diangkat untuk memimpin perbaikan suatu bidang pengajaran tertentu.²⁹

Pengawasan merupakan sebuah aktivitas akademik yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih dari orang yang disupervisinya. Tujuan utama pengawasan/supervisi akademik adalah memberi pelayanan kepada guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran, membina guru agar lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran, memfasilitasi guru agar dapat mengajar lebih efektif dan menyenangkan, melakukan kerjasama dengan guru untuk mengembangkan kurikulum serta melaksanakan pembinaan.

Mukhneri Mukhtar mengemukakan bahwa ada beberapa unsur yang terkandung di dalam kegiatan pengawasan, di antaranya: *pertama*, pengawasan terdiri dari proses pengamatan tentang kenyataan atau fakta yang sebenarnya mengenai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang diamati. *Kedua*, kenyataan atau

²⁸Kementerian Pendidikan Nasional RI, *Buku Kerja Pengawas Sekolah* (Jakarta: Dirjen Pusat Pengembangan Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 2011), h. 34.

²⁹Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pengajaran di Era Otonomi Daerah*, h. 54.

fakta sebenarnya ini merupakan bahan untuk merumuskan tindakan-tindakan pengawasan yang dapat menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. *Ketiga*, pengawasan lebih ditekankan pada pekerjaan yang sedang berjalan dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan. *Keempat*, pengawasan sebagai usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan, mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi untuk menjamin kegiatan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. *Kelima*, pengawasan bersifat konstruktif, dan tidak mencari kesalahan, akan tetapi lebih diarahkan pada efisiensi waktu, dana, material, metode dan tenaga dengan meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.³⁰

Mencermati makna tersebut dapat dipahami bahwa seorang pengawas adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugas supervisi, ia bertindak secara normatif, dan atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk melaksanakan supervisi diperlukan keahlian yang dapat melihat secara cermat terhadap permasalahan peningkatan kualitas pendidikan.

C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pengawas

1. Tugas Pengawas

Tugas pengawas sebagaimana yang dikemukakan oleh Ben M. Haris dalam Syaiful Sagala bahwa secara spesifik ada 10 bidang tugas pengawas, yaitu:

- a. Mengembangkan kurikulum. Mendesain kembali (*redesign*) apa yang diajarkan, siapa yang mengajar, bagaimana polanya, membimbing pengembangan kurikulum, menetapkan standar, merencanakan unit pelajaran, dan melembagakan mata pelajaran.

³⁰ Mukhneri Mukhtar, *Supervision: Improving Performance and Development Quality in Education* (Cet. I; Jakarta: PPs UNJ Press, 2011), h. 5-6.

- b. Pengorganisasian pengajaran. Pengelolaan peserta didik, ruang belajar, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara koordinatif dilaksanakan dengan efisien dan efektif.
- c. Pengadaan staf. Menyediakan staf pengajaran dengan jumlah yang cukup sesuai kompetensi bidang pengajaran dan melakukan pembinaan secara terus menerus.
- d. Menyediakan fasilitas. Mendesain perlengkapan dan fasilitas untuk kepentingan pengajaran dan memilih fasilitas sesuai keperluan pengajaran.
- e. Penyediaan bahan-bahan, memilih dan mendesain bahan-bahan yang digunakan dan diimplementasikan untuk pengajaran.
- f. Penyusunan penataran pendidikan. Merencanakan dan mengimplementasikan pengalaman-pengalaman belajar untuk memperbaiki kemampuan staf pengajaran dalam menumbuhkan mutu pengajaran.
- g. Pemberian orientasi anggota-anggota staf. Memberi informasi pada staf pengajar atas bahan dan fasilitas yang ada untuk melakukan tanggung jawab pengajaran.
- h. Pelayanan peserta didik. Secara koordinatif memberikan pelayanan yang optimal dan hati-hati terhadap peserta didik untuk mengembangkan pertumbuhan belajar.
- i. Hubungan masyarakat, memberikan dan menerima informasi dari masyarakat untuk meningkatkan pengajaran lebih optimal.
- j. Penilaian pengajaran terhadap perencanaan pengajaran. Implementasikan pengajaran, menganalisis dan menginterpretasikan data, mengambil keputusan,

dan melakukan penilaian hasil belajar peserta didik, untuk memperbaiki pengajaran.³¹

Jamal Ma'mur Asmani berpendapat bahwa tugas pengawas sekolah adalah melaksanakan pembinaan, penilaian teknik dan administratif pendidikan terhadap sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas ini dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Supervisi yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah meliputi supervisi akademik, yang berhubungan dengan aspek proses pembelajaran, dan supervisi manajerial, yang berhubungan dengan aspek pengelolaan dan administrasi sekolah.³²

Tugas pokok pengawas sekolah satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:

- a. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah.
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya.
- c. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan *stakeholder* sekolah.³³

Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik

³¹ Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 102.

³² Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah* (Cet. I; Jogjakarta: Diva Press, 2012), h. 78-79.

³³ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Manajemen Pengembangan Tenaga Pengawas Satuan Pendidikan* (Jakarta: Ditjen PMPTK, 2006), h. 25.

supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Tugas Pengawas mencakup: (1) *inspecting* (mensupervisi), (2) *advising* (memberi advis atau nasehat), (3) *monitoring* (memantau), (4) *reporting* (membuat laporan), (5) *coordinating* (mengkoordinir) dan (6) *performing leadership* dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut.³⁴

Tugas pokok *inspecting* (mensupervisi) meliputi tugas mensupervisi kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya, manajemen sekolah, dan aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, kerjasama dengan masyarakat.

Tugas pokok *advising* (memberi advis/nasehat) meliputi advis mengenai sekolah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi advis kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, memberi advis kepada tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah, memberi advis kepada orang tua siswa dan komite sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Tugas pokok *monitoring/pemantauan* meliputi tugas: memantau penjaminan/standar mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf

³⁴Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 119.

sekolah, memantau hubungan sekolah dengan masyarakat, memantau data statistik kemajuan sekolah, memantau program-program pengembangan sekolah.³⁵

Tugas pokok *reporting* meliputi tugas: melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat publik, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya.

Tugas pokok *coordinating* meliputi tugas: mengkoordinir sumber-sumber daya sekolah baik sumber daya manusia, material, financial dll, mengkoordinir kegiatan antar sekolah, mengkoordinir kegiatan preservice dan in service training bagi Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah lainnya, mengkoordinir personil stakeholder yang lain, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah.

Tugas pokok *performing leadership*/memimpin meliputi tugas: memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan inovasi sekolah, partisipasi dalam memimpin kegiatan manajerial pendidikan di Diknas yang bersangkutan, partisipasi pada perencanaan pendidikan di kabupaten/kota, partisipasi pada seleksi calon kepala sekolah/calon pengawas, partisipasi dalam akreditasi sekolah, partisipasi dalam merekrut personal untuk proyek atau program-program khusus pengembangan mutu sekolah, partisipasi dalam mengelola konflik di sekolah dengan *win-win solution* dan partisipasi dalam menangani pengaduan baik dari internal sekolah maupun dari masyarakat.³⁶

³⁵Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* 2010, h. 120.

³⁶Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* 2010, h. 120.

Selanjutnya berdasarkan SK Menpan RB No. 21/2010, “tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.”³⁷

Mengacu pada uraian tugas pokok pengawas di atas maka dapat dikemukakan bahwa tugas pokok pengawas dapat dilihat dalam dua aspek yaitu pada aspek teknis pendidikan dan pembelajaran (supervisi akademik), dan pada aspek manajerial yang menekankan pada teknis manajemen sekolah. Selain itu, tugas pokok pengawas adalah melakukan pembinaan, penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan pada sejumlah sekolah yang menjadi tanggung jawabnya demi peningkatan mutu pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang optimal.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 55 dijelaskan bahwa pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Selanjutnya pada pasal 57 diperjelas bahwa supervisi manajerial dan supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawasa atau penilik satuan pendidikan dan kepala sekolah satuan pendidikan.³⁸ Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah menyebutkan bahwa Pengawas satuan pendidikan

³⁷Lihat Kemendiknas RI, *Buku Kerja Pengawas Sekolah* 2011, h. 61

³⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Bagais, 2004), h. 186,

dituntut memiliki kompetensi supervisi manajerial dan kompetensi supervisi akademik. Esensi dari supervisi manajerial adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan, terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah, sehingga berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah serta memenuhi standar pendidikan nasional. Adapun supervisi akademik esensinya berkenaan dengan tugas pengawas untuk membina guru dalam meningkatkan mutu pembelajarannya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik.³⁹

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah di atas maka dapat dikemukakan bahwa pengawasan pada satuan pendidikan pada intinya difokuskan pada dua aspek pengawasan yakni aspek akademik dan manajerial yang bertujuan untuk memantapkan proses pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Lingkup kerja pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk melaksanakan tugas pokok diatur sebagai berikut:

- a. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan jumlah guru yang dibina pada satu atau beberapa sekolah.
- b. Jumlah guru yang harus dibina untuk tiap jenis pengawas mata pelajaran sebagai berikut.

³⁹Lihat Departemen Pendidikan Nasional RI, *Metode dan Teknik Supervisi* (Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008), h. 7.

- 1) Pengawas Guru Taman Kanak-kanak (Pendidikan Usia Dini Formal) melakukan pengawasan dan membina paling sedikit sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di TK,
- 2) Pengawas Guru Sekolah Dasar paling sedikit 60 guru dan paling banyak 75 guru kelas di SD,
- 3) Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMP,
- 4) Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Atas melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMA,
- 5) Pengawas Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru di SMK,
- 6) Pengawas Sekolah Luar Biasa melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 40 guru dan paling banyak 60 guru mata pelajaran luar biasa.

Sedangkan lingkup kerja pengawas mata pelajaran adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan Program Pengawasan Mata Pelajaran atau Kelompok Mata Pelajaran
 - 2) Setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan akademik (RKA).

- 3) Program pengawasan tahunan pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran disusun oleh kelompok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- 4) Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran pada setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas mata pelajaran ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- 5) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
- 6) Program tahunan, program semester, dan RKA sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan.

b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian

- 1) Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaanya.

- 2) Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.
- 3) Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA yang telah disusun.

c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan

- 1) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan.
 - 2) Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.
 - 3) Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.
 - 4) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru.
- a) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di MGMP atau KKG.
- b) Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran/ pembimbingan.

- c) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan *group conference*, serta kunjungan kelas melalui supervisi akademik.⁴⁰

Mencermati tugas pokok pengawas tersebut maka dapat dikemukakan bahwa untuk menjadi seorang pengawas, bukan suatu hal yang mudah akan tetapi menuntut adanya kemampuan dalam melaksanakan tugas kepengawasan tersebut karena tugas seorang pengawas memiliki cakupan yang sangat luas.

2. *Fungsi Pengawas*

Selain pengawas memiliki tugas pokok, juga memiliki fungsi yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Matt Modrcin sebagaimana yang dikutip oleh Dadang Suhardan menyebutkan bahwa pengawas memiliki empat fungsi penting yang harus diperankan dalam setiap tugasnya, yaitu: *Administratif function, Evaluation process, Teaching function* dan *Role of consultant*.⁴¹ Sejalan dengan hal tersebut, Made Pidarta dalam Sudarwan Danim dan Khairil mengemukakan pula bahwa fungsi pengawas sebagai berikut:

- a. Sebagai perantara dalam menyampaikan minat para peserta didik, orang tua, program sekolah kepada pemerintah dan badan-badan berkompeten lainnya.
- b. Memantau penggunaan dan hasil-hasil sumber belajar.
- c. Merencanakan program pendidikan untuk generasi selanjutnya.

⁴⁰Depdiknas, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas* (Jakarta Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2009) h. 203

⁴¹Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pengajaran di Era Otonomi Daerah* 2010, h. 55.

d. Memilih inovasi yang konsisten dengan masa depan.⁴²

Fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas berkaitan dengan fungsi kepengawasan. Fungsi supervisi sangat penting diketahui oleh para pimpinan pendidikan termasuk pengawas. Fungsi-fungsi dimaksud meliputi bidang kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan proses kelompok, bidang administrasi personil dan bidang evaluasi.⁴³ Fungsi-fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Dalam bidang kepemimpinan

- 1) Menyusun rencana dan *policy* bersama.
- 2) Mengikutsertakan guru-guru dalam berbagai kegiatan.
- 3) Memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan.
- 4) Mempertinggi daya kreatif pada anggota kelompok.
- 5) Mengikutsertakan semua anggota dalam menetapkan-menetapkan putusan-putusan.
- 6) Menghilangkan rasa malu dan rasa rendah diri pada anggota kelompok sehingga mereka berani mengemukakan pendapat demi kepentingan bersama.

b. Dalam bidang hubungan kemanusiaan

- 1) Memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan yang dialaminya untuk pelajaran demi perbaikan selanjutnya, bagi diri sendiri maupun bagi anggota kelompoknya.

⁴²Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* 2010, h. 158.

⁴³M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Cet. XX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 86-87.

- 2) Membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi anggota kelompok, seperti dalam hal kemalasan, merasa rendah diri, acuh tak acuh, pesimistis, dsb.
 - 3) Mengarahkan anggota kelompok kepada sikap-sikap yang demokratis
 - 4) Memupuk rasa saling menghormati di antara sesama anggota kelompok dan sesama manusia.
 - 5) menghilangkan rasa curiga mencurigai antara anggota kelompok.
- c. Dalam bidang pembinaan proses kelompok
- 1) Mengetahui masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan maupun kemampuan masing-masing.
 - 2) Menimbulkan dan memelihara sikap percaya-mempercayai antara sesama anggota maupun antara anggota dan pimpinan.
 - 3) Memupuk sikap dan kesediaan tolong menolong.
 - 4) Memperbesar rasa tanggung jawab para anggota kelompok.
 - 5) Bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan atau perselisihan pendapat di antara anggota kelompok.
- d. Dalam bidang administrasi personel
- 1) Memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan.
 - 2) Menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing.
 - 3) Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan daya kerja serta hasil maksimal.

e. Dalam bidang evaluasi

- 1) Memahami dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan terinci.
- 2) Menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran yang akan digunakan sebagai kriteria penilaian.
- 3) Menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat diolah menurut norma-norma yang ada.
- 4) Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga mendapat gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan.

Sejalan dengan itu, Jamal menjelaskan bahwa supervisi pendidikan mempunyai tiga fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu kegiatan menyangkut untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan.
- c. sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing.⁴⁴

Maryono menambahkan bahwa fungsi utama supervisi pendidikan adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran, menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru.⁴⁵ Sejalan dengan itu, Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa supervisi berfungsi sebagai kegiatan meningkatkan mutu pembelajaran, sebagai pemicu atau penggerak

⁴⁴Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah* 2012, h. 31.

⁴⁵Maryono, *Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 21.

terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan sebagai kegiatan memimpin dan membimbing.⁴⁶

Pengawas sebagai salah satu tenaga kependidikan harus memahami dan mampu melaksanakan supervisi dengan fungsi dan tugas pokoknya baik yang menyangkut pemantauan, penilaian, penelitian, perbaikan maupun pengembangan. Dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan secara simultan, konsisten dan kontinyu dalam suatu program supervisi, sebagai inti kegiatan supervisi adalah mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut kedalam tugas pembinaan terhadap pribadi guru yang disupervisi. Supervisi akademik yang dilaksanakan oleh pengawas tersebut harus didasarkan pada kerjasama, partisipasi dan kolaborasi dan tidak berdasarkan paksaan, sehingga diharapkan timbul kesadaran serta perkembangan, inisiatif dan kreativitas dari pihak guru dan bukan konfirmatis.

Jadi supervisi dapat dimaknai sebagai pemberian bimbingan, pembinaan, dan membantu guru meningkatkan kreativitas dan potensi secara optimal. Apabila fungsi-fungsi supervisi ini benar-benar dikuasai dan dijalankan sebaik-baiknya oleh pengawas, maka dapat dipastikan kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah berlangsung baik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

3. Wewenang Pengawas

Selain tugas dan fungsi yang harus diperhatikan oleh pengawas, perlu juga hal-hal yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang seorang pengawas, yaitu::

- a. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai kode etik profesi.
- b. Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya di sekolah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Supervisi* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 13.

c. Menentukan dan mengusulkan program-program pembinaan serta melakukan pembinaan.⁴⁷

Pengawas PAI pada sekolah sebagaimana dalam pasal 5 ayat 4 Permenag RI nomor 2 tahun 2012 menyebutkan bahwa pengawas PAI berwenang:

- 1) memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/ atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada Kepala Sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/kota;
- 2) memantau dan menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan;
- 3) melakukan pembinaan terhadap Guru PAI;
- 4) memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang; dan
- 5) memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat yang berwenang.⁴⁸

Terkait dengan hal itu, menurut Sudarwan Danim dan Khairil ada beberapa kewenangan yang ada pada pengawas yaitu:

- (a) Bersama kepala sekolah dan guru yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan* 2004, h. 186,

⁴⁸Permenag RI, *Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah*, nomor 2 tahun 2012, bab III, pasal 5, ayat 4.

- (b)Menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah dan guru pada sekolah yang bersangkutan.
- (c)Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun.
- (d)Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas.⁴⁹

Menurut Dirjen Bimbagais Depag RI, menguraikan bahwa wewenang pengawas antara lain:

- (1)Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.
- (2)Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya di sekolah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- (3)Menentukan dan mengusulkan program-program pembinaan serta melakukan pembinaan.⁵⁰

Berdasarkan dari beberapa wewenang pengawas tersebut maka dapat dikatakan bahwa wewenang seorang pengawas memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pengawas harus betul-betul memiliki berbagai macam kamampuan dan keahlian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

⁴⁹Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* 2010, h. 124.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Dirjen Bimbagais, 2003), h, 72.

D. Kompetensi Pengawas

Kompetensi merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, sikap, perilaku yang harus dimiliki seseorang pengawas dalam menjalankan tugasnya guna mencapai standar kualitas pekerjaannya.

Secara etimologi kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency*, yang berarti kecakapan, kemampuan, kompetensi atau wewenang.⁵¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompetensi diartikan sebagai wewenang (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu atau kemampuan menguasai gramatika secara abstrak atau batiniah.⁵²

Kompetensi atau *competency* mempunyai persamaan kata dengan *proficiency* dan *ability*, yang mempunyai arti kurang lebih sama dengan kemampuan dan kecakapan, hanya saja untuk kata *proficiency* lebih tepat untuk dipahami sebagai orang yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi (keahlian), sedangkan *ability* lebih dekat kepada bakat yang dimiliki seseorang.⁵³ Dengan begitu maka kompetensi dapat dipahami sebagai kemampuan atau kecakapan.

Aabila dihubungkan dengan pendidikan dan pembelajaran, para ahli pendidikan dan pembelajaran sudah cukup banyak memberikan rumusan untuk mendefinisikan kompetensi, antara lain: Finch dan Crunklinton dalam E. Mulyasa,

⁵¹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *An English-Indonesia Dictionary* (Cet. 23; Jakarta: Gramedia, 1996), h. 132.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008), h. 584.

⁵³ John M. Echols dan Hasan Shadily, *An English-Indonesia Dictionary*, h. 449.

mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal senada juga dikemukakan oleh Mc. Ashan, bahwa *competency is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective and psychomotor behaviors.*⁵⁴ Artinya: Kompetensi adalah suatu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor dengan sebaik-baiknya.

Mardapi dkk, sebagaimana dikutip Mansur Muslich, merumuskan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, penerapan kedua hal tersebut dalam melaksanakan tugas di lapangan kerja.⁵⁵ Pendapat ini juga didukung oleh Hall dan Jones yang mendefinisikan kompetensi sebagai pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan diukur.⁵⁶

Menurut Muhaimin, kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.⁵⁷ Sifat intelegen harus ditunjukkan oleh kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak. Sifat

⁵⁴ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 38.

⁵⁵ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, h. 38

⁵⁶ Mansur Muslich, *KTSP; Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 15.

⁵⁷ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 151.

tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika. Dalam arti tindakan itu benar ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, efisien, efektif dan memiliki daya tarik dilihat dari sudut teknologi dan baik ditinjau dari sudut etika.

Sementara itu, Departemen Pendidikan Nasional memberikan rumusan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai dasar untuk melakukan sesuatu.⁵⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat (10), disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.⁵⁹

Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya guna mencapai standar kualitas pekerjaannya. Selanjutnya, mengenai kompetensi pengawas sekolah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 16.

⁵⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen* (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 4.

pada Sekolah. Dari kedua peraturan menteri tersebut menjelaskan bahwa ada enam dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.⁶⁰

Kompetensi merupakan suatu yang wajib dimiliki oleh seorang guru sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan dalam pasal 8. Kompetensi yang dimaksud yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, ini disebut dalam pasal 10 ayat 1.⁶¹

Berdasarkan dari beberapa rumusan definisi kompetensi di atas maka dapat dikatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan dan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Berkenaan dengan kompetensi pengawas sekolah telah ditetapkan dalam Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah dan Permenag Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Dari kedua permen tersebut menjelaskan bahwa ada enam dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Permenag Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*, Bab VI Pasal 8, ayat 1.

⁶¹Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen* (Cet. 4; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 16-17. Lihat *Permenag RI. Nomor 16 Tahun 2010* tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah pada pasal 16 ayat 2, 3, 4, 5, dan 6. Dalam Peraturan Menteri Agama ini menambah satu jenis kompetensi yakni kompetensi Kepemimpinan.

yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.⁶²

Keenam kompetensi tersebut dijabarkan menjadi 36 kompetensi. Untuk jelasnya diuraikan berikut ini:

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian pengawas sekolah adalah kemampuan pengawas dalam menampilkan dirinya atau *performance* diri sebagai pribadi yang:

- a. Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.
- b. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
- c. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.
- d. Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.⁶³

Kompetensi kepribadian sebagaimana dikemukakan di atas, mengandung makna sebagai suatu sikap dan perilaku yang ditampilkan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengandung empat karakteristik di atas. Ini berarti sosok pribadi pengawas sekolah harus tampil beda dengan sosok

⁶²Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah* h. 3-4., lihat juga Kementerian Agama RI Permenag Nomor 2 Tahun 2012, tentang *Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Pada Sekolah*, Bab VI Pasal 8, ayat 1.

⁶³Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah* h. 3-4..

pribadi yang lain dalam hal tanggung jawab, kreativitas, rasa ingin tahu, dan motivasi dalam kerja. Sosok pribadi tersebut diharapkan menjadi kebiasaan dalam perilakunya.

2. Kompetensi Supervisi Manajerial

Kompetensi supervisi manajerial adalah kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan manajerial yakni menilai dan membina kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah dalam mempertinggi kualitas pengelolaan dan administrasi sekolah. Pengawasan manajerial yang dilakukan oleh pengawas sekolah pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari penyusunan rencana program sekolah berbasis data sekolah, proses pelaksanaan program berdasarkan sasaran, sampai dengan penilaian program dan hasil yang ditargetkan.⁶⁴

Jadi pada dasarnya kompetensi manajerial pengawas sekolah merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pengawas dalam melakukan pembinaan, penilaian, bimbingan dalam bidang administrasi dan pengelolaan sekolah. Oleh sebab itu pengawas dituntut memiliki kemampuan manajerial maupun kemampuan menguasai program dan kegiatan bimbingan serta memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah binaannya. Kompetensi manajerial yang harus dimiliki pengawas sekolah yaitu:

- a. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.

⁶⁴Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan* 2010, h. 15.

- b. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis.
- c. Menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yang sejenis.
- d. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan tindaklanjutnya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang sejenis.
- e. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.
- f. Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah yang sejenis.
- g. Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok di sekolah menengah yang sejenis.
- h. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah yang sejenis.⁶⁵

Inti dari kompetensi manajerial adalah kemampuan yang dimiliki oleh pengawas sekolah dalam menguasai teori, konsep, metode dan teknik pengawasan pendidikan dan aplikasinya dalam menyusun program.

3. Kompetensi Supervisi Akademik

⁶⁵Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah* h. 9.

Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan pengawasan akademik yakni membina dan menilai guru dalam rangka mempertinggi kualitas pembelajaran yang dilaksanakan agar berdampak pada hasil belajar peserta didik. Dimensi dari kompetensi ini adalah:

- a. Membimbing guru dalam menyusun silabus berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
- b. Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
- c. Membimbing guru dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran.
- d. Membimbing guru dalam menggunakan media pembelajaran.⁶⁶

Berdasarkan kompetensi supervisi akademik tersebut di atas maka tampak jelas bahwa kompetensi supervisi akademik pada intinya adalah membimbing guru dalam menyusun perangkat dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Termasuk dalam hal ini adalah membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP serta membimbing guru dalam menggunakan metode dan media pembelajaran.

Inti sari pengelolaan pembelajaran adalah menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang kemudian diaplikasikan dalam aktivitas pembelajaran dengan pemilihan strategi, metode, teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi, menilai proses dan hasil pembelajaran serta

⁶⁶Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah* h. 11.

penelitian tindakan kelas. Oleh sebab itu pengawas sekolah seyogyanya melakukan pembinaan secara rutin agar guru lebih kreatif dalam mengelola pembelajarannya.

4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

Kompetensi Evaluasi Pendidikan adalah kemampuan pengawas sekolah dalam kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyimpulkan data dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Dimensi kompetensi evaluasi pendidikan dijabarkan menjadi enam kompetensi inti yaitu:

- a. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran
- b. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran
- c. Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan
- d. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar peserta didik dan menganalisisnya untuk memperbaiki mutu pembelajaran
- e. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran.
- f. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah.⁶⁷

Penjabaran kompetensi evaluasi pendidikan tersebut tampak bahwa materi pokoknya adalah penilaian proses dan hasil belajar, penilaian program pendidikan, penilaian kinerja guru, kinerja kepala sekolah. Penilaian itu sendiri diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

⁶⁷Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, h. 12.

5. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan adalah kemampuan pengawas sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian pendidikan serta menggunakan hasil-hasilnya untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan. Dimensi kompetensi penelitian dan pengembangan terdiri atas:

- a. Mengusai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian dan pendidikan.
- b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas kepengawasan maupun untuk pengembangan karir profesi.
- c. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
- d. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya.
- e. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
- f. Menulis karya ilmiah dalam bidang pendidikan dan kepengawasan serta memanfaatkannya untuk perbaikan kualitas pendidikan.
- g. Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kepengawasan.
- h. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.⁶⁸

⁶⁸Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, h. 12

Penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan data dan informasi untuk memecahkan masalah praktis dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan metode ilmiah yakni memecahkan masalah dengan menggunakan logika berfikir yang didukung oleh data empiris. Logika berpikir tampak dalam prosesnya dengan menempuh langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan data, mengolah dan menafsirkan data, menguji data sampai penarikan kesimpulan.

Berkaitan dengan kompetensi penelitian, materi yang perlu dikuasai oleh pengawas sekolah antara lain, pendekatan, metode, dan jenis penelitian, merencanakan dan melaksanakan penelitian, mengolah dan menganalisis data, menulis laporan hasil penelitian sebagai karya tulis ilmiah serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian. Kompetensi penelitian bagi pengawas bermanfaat ganda yakni manfaat untuk dirinya sendiri agar dapat menyusun karya tulis ilmiah (KTI) berbasis penelitian dan manfaat untuk membina guru dan kepala sekolah dalam hal merencanakan dan melaksanakan penelitian khususnya *research action* (penelitian tindakan).

6. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial pengawas sekolah adalah kemampuan pengawas sekolah dalam membina hubungan dengan berbagai pihak serta aktif dalam kegiatan profesi pengawas (APSI). Kompetensi pengawas sekolah mengindikasikan dua ketrampilan yang harus dimiliki pengawas sekolah yakni:

- a. Ketrampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan termasuk ketrampilan bergaul

- b. Keterampilan bekerja dengan orang lain baik secara individu maupun secara kelompok/organisasi”.⁶⁹

Mencermati uraian tentang kompetensi sosial di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial pada intinya diharapkan tampilnya sosok pribadi pengawas yang luwes dan terbuka serta selalu memandang positif orang lain.

E. Kompetensi Profesional Guru

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional adalah kemampuan menyusun materi pembelajaran secara luas dan mendalam sebagai inti pengembangan silabus serta kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.⁷⁰ Oleh karena itu, kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru diharapkan mampu melaksanakan pendidikan secara efektif dan efisien.

Syaiful Sagala mengemukakan bahwa kompetensi profesional meliputi:

- a. Kemampuan guru dalam menguasai materi ajar
- b. Kemampuan guru dalam menguasai KI dan KD
- c. Kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar
- d. Kemampuan guru dalam menggunakan teknologi informasi.⁷¹

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional bukan suatu hal yang mudah akan tetapi memiliki tantangan yang sangat besar terutama berkaitan dengan kompetensi. Artinya bahwa

⁶⁹Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, h. 12

⁷⁰Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 100.

⁷¹Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 41.

untuk menjadi guru yang profesional, dibutuhkan berbagai macam kompetensi dan keahlian tertentu.

2. Macam-macam Kompetensi Guru

Guru sebagai pendidik profesional harus memiliki berbagai macam kompetensi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat 1 menyatakan:

Guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁷²

Lebih khusus lagi ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan yaitu: “Guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan”.⁷³

Mencermati uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional maka harus memiliki berbagai macam kompetensi sehingga dengan kompetensi yang dimilikinya maka tentu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Keberadaan guru yang profesional dan bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Hampir semua bangsa di dunia selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan serta kesejahteraan hidup guru yang

⁷²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, h. 9.

⁷³Kementerian Agama RI, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2011), h. 60.

memadai. adanya kebijakan tersebut maka sangat diharapkan kehadiran seorang guru yang profesional.

Guru profesional adalah guru yang menyadari tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diembannya, memiliki pemahaman yang tinggi serta mengenal dirinya sebagai pribadi yang dipanggil untuk mengabdikan diri kepada masyarakat melalui pendidikan dan mendampingi peserta didik untuk belajar.⁷⁴

Menjadi seorang guru yang profesional bukan suatu hal yang mudah karena harus ditunjang dengan berbagai macam kompetensi. Adapun kompetensi tersebut, khususnya kompetensi guru Pendidikan Agama Islam, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kompetensi Pedagogis

Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Kemampuan guru dalam menyusun silabus dan RPP
- 2) Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran
- 3) Kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran
- 4) Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian.⁷⁵

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yang dimiliki seorang guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.⁷⁶

⁷⁴ E. Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 40.

⁷⁵ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, h. 19.

⁷⁶ Martis Yamin dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 8.

Kompetensi kepribadian yang dimiliki seorang guru sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik, sehingga setiap guru dituntut memiliki kompetensi kepribadian. Keberhasilan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran dapat diimplementasikan dalam pengembangan kepribadian guru yang mantap, dan dinamis yang meliputi:

- 1) Kemantapan dan integrasi pribadi. Seorang guru dituntut dapat bekerja secara teratur, konsisten, dan kreatif dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru demi tercapainya tujuan pendidikan.
- 2) Peka terhadap perubahan dan pembaharuan artinya apa yang dilakukan di sekolah tetap konsisten dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan jaman.
- 3) Berpikir alternatif. Artinya bahwa seorang guru harus mampu berpikir secara kreatif dan berwawasan luas.
- 4) Adil, Jujur, dan objektif. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sikap adil akan menumbuhkan rasa disiplin diri bagi peserta didik dan sekaligus akan menambah wibawa guru.
- 5) Disiplin dalam menjalankan tugas. Disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan yang teratur serta mencintai dan menghargai pekerjaannya.
- 6) Ulet dan tekun bekerja. Artinya guru bekerja tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, dan tidak mudah putus asa sehingga program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.
- 7) Berusaha memperoleh hasil kerja yang baik. Dengan adanya usaha untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan maka kemampuan guru akan bertambah pula, sehingga tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam kegiatan pembelajaran.

- 8) Simpatik, menarik, luwes, bijaksana, dan sederhana. Sifat kemampuan pribadi guru dalam kegiatan pembelajaran memerlukan kematangan pribadi, kedewasaan sosial, pengalaman hidup bermasyarakat, dan pengalaman belajar yang memadai khususnya dalam pengalaman praktek mengajar.
- 9) Bersifat terbuka. Bersifat terbuka artinya bahwa guru dituntut meningkatkan dan memperbaiki suasana kehidupan sekolah berdasarkan kebutuhan dan tuntutan berbagai pihak karena sifat terbuka dapat terwujud melalui kegiatan pembelajaran yang demokratis.
- 10) Kreatif. Guru yang kreatif harus mampu melihat berbagai kemungkinan yang perkiraannya sama baik, guru harus lebih banyak bertanya, belajar dan berdedikasi tinggi.
- 11) Berwibawa. Dengan adanya kewibawaan maka kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa kompetensi kepribadian harus dijadikan sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan inovasi bagi peserta didiknya sehingga guru sebagai teladan harus memiliki sikap dan kepribadian yang utuh agar dapat dijadikan tokoh panutan dan idola dalam seluruh aspek kehidupan.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- 1) Berkomunikasi, lisan, tulisan, atau isyarat,

⁷⁷ Hamid Darmadi, *Kemampuan Dasar Mengajar Landasan Konsep dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 54.

- 2) Mengusahakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan
- 4) Begaul secara santun dengan masyarakat sekitar.⁷⁸

Guru sebagai pribadi yang ditokohkan masyarakat tidak lagi dipandang hanya sebagai pengajar di kelas, tetapi diharapkan pula tampil sebagai pendidik di masyarakat yang seyogyanya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan menyusun materi pembelajaran secara luas dan mendalam sebagai inti pengembangan silabus serta kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.⁷⁹ Oleh karena itu, kompetensi profesional yang dimiliki oleh seorang guru diharapkan mampu melaksanakan pendidikan secara efektif dan efisien.

Syaiful Sagala mengutip pendapat M. User Usman yang mengemukakan bahwa kompetensi profesional meliputi:

- e. Kemampuan guru dalam menguasai materi ajar
- f. Kemampuan guru dalam menguasai KI dan KD
- g. Kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar
- h. Kemampuan guru dalam menggunakan teknologi informasi.⁸⁰

e. Kompetensi Kepemimpinan.

⁷⁸ Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*, h. 33.

⁷⁹ Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 100.

⁸⁰ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 41.

Kompetensi kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam. Kompetensi kepemimpinan yang dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam meliputi:

- 1) Kemampuan membudayakan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran agama.
- 2) Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.
- 3) Kemampuan menjadi pembimbing dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.
- 4) Kemampuan mengarahkan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸¹

Berdasarkan uraian tersebut tentang kompetensi guru maka dapat dipahami bahwa guru sebagai pendidik profesional di bidang pendidikan, sangat dituntut kemampuan dan keprofesionalannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

F. Syarat-syarat Guru Profesional

Kehadiran seorang guru yang profesional dalam melaksanakan profesinya, tentu sangat diharapkan. Secara formal sudah menjadi keharusan bahwa suatu profesi menuntut adanya tenaga yang profesional, termasuk dalam hal ini adalah profesi sebagai guru. Dalam setiap profesi, khususnya guru tentu harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, seperti harus memiliki kedisiplinan ilmu yang baik, memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, dan lain sebagainya.

⁸¹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, h. 62.

Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menentukan kelayakan seseorang dalam dalam memangku profesinya. Selain itu syarat tersebut dimaksudkan agar seorang guru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Keberadaan seorang guru yang profesional merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong lahirnya guru yang berkualitas. Salah satunya adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu, dengan memberikan jaminan kesejahteraan hidup yang memadai. Dengan adanya jaminan kesejahteraan hidup tersebut, seorang guru semakin dituntut untuk melaksanakan tugas dan profesinya secara profesional.⁸²

Agama Islam telah mengajarkan kepada manusia bahwa suatu profesi hendaknya dilaksanakan oleh orang yang mempunyai keahlian di dalamnya. Karena apabila profesi tersebut tidak dilaksanakan oleh orang yang mempunyai keahlian di dalamnya maka profesi tersebut lambat laun akan mengalami kehancuan. Dengan begitu maka guru sebagai pendidik profesional harus memiliki keahlian, kemahiran dan keterampilan dalam melaksanakan profesinya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Allah swt. menjelaskan dalam QS al-Zumar/39: 39.

قُلْ يَتَقَوِّمُوا أَعْمَالَكُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui.⁸³

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa setiap pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Pekerjaan yang dipegang oleh orang yang ahli di

⁸² Agus Wibowo dan Harmin, *Menjadi Guru Berkarakter : Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru*, h. 18.

⁸³ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 462.

bidangnya tentu akan memberikan hasil sesuai dengan yang optimal. Demikian halnya dengan guru sebagai salah satu profesi harus dilaksanakan secara profesional. Apabila profesi guru tersebut dilaksanakan secara profesional maka tentu akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

Meyakinkan setiap orang khususnya pada setiap guru bahwa pekerjaannya merupakan pekerjaan profesional adalah salah satu upaya pertama yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian standar proses pendidikan sesuai dengan harapan. Sebab banyak orang termasuk guru sendiri yang meragukan bahwa guru merupakan jabatan profesional. Ada yang beranggapan setiap orang bisa jadi guru walaupun mereka tidak memahami ilmu keguruan, asal paham materi pelajaran yang akan diajarkannya.⁸⁴

Pendapat semacam itu ada benarnya apabila mengajar hanya dianggap sebagai proses penyampaian materi pelajaran saja. Konsep mengajar yang demikianuntutannya sangat sederhana, yaitu asal paham informasi yang akan diajarkannya kepada peserta didik maka guru sudah bisa menjadi guru. Tetapi mengajar tidak sesederhana itu. Mengajar bukan hanya sekadar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi suatu proses mengubah perilaku peserta didik menuju ke arah yang lebih baik. Untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional maka dapat dilihat dari syarat-syarat atau ciri pokok dari pekerjaan profesional yaitu:

- a. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga

⁸⁴Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2011), h. 14.

kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- b. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya, sehingga antara profesi yang satu dengan profesi yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas.
- c. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya.
- d. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkannya dari profesinya itu.⁸⁵

Berdasarkan dari ciri pokok pekerjaan profesional tersebut maka dapat dikemukakan bahwa syarat-syarat pekerjaan guru dapat dikatakan sebagai pekerjaan profesional adalah apabila guru tersebut memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan serta keahlian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Dalam ajaran Islam, manusia dianjurkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian masing-masing agar tugas yang diamanahkan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ
فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ
بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلَ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

⁸⁵Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, h. 15.

قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)⁸⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Ketika Rasulullah saw. dalam suatu majelis sedang berbicara dengan suatu kaum, datanglah seorang kampung dan berkata: Kapanakah kiamat itu? Rasulullah saw. terus berbicara, lalu sebagian kaum berkata. Beliau mendengar apa yang dikatakan olehnya, namun beliau benci terhadap apa yang dikatakan itu dan sebagian dari mereka berkata namun beliau tidak mendengarnya. Sampai ketika beliau selesai berbicara maka beliau bersabda: Di manakah gerangan orang yang bertanya tentang kiamat? Ia berkata: Saya wahai Rasulullah, Beliau bersabda: Apabila amanat itu di sia-siakan maka nantikanlah kiamat. Ia berkata: Bagaimana menyia-nyiakannya? Beliau bersabda: Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah suatu kehancuran. (HR. Bukhari)

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa setiap pekerjaan sebaiknya diserahkan kepada ahlinya supaya pekerjaan tersebut dapat dikerjakan secara tuntas sehingga memberikan hasil yang leboh optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjadi seorang guru yang profesional ada beberapa syarat yang harus dimiliki, di antaranya adalah:

- 1) Seorang guru harus memiliki dan menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan baik. Ia benar-benar seorang ahli dalam bidang ilmu yang diajarkannya. Karena bidang pengetahuan apa pun selalu mengalami perkembangan maka seorang guru profesional juga harus terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang diajarkannya, sehingga tidak ketinggalan zaman.

⁸⁶ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭuruq al-Najah, 1422H), h. 21.

- 2) Seorang guru harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya (*transfer of knowledge*) kepada peserta didiknya secara efektif dan efisien.
- 3) Seorang guru harus memiliki dan berpegang teguh pada kode etik profesional. Kode etik di sini lebih dikhususkan pada perlunya memiliki akhlak yang mulia.⁸⁷

Terkait dengan hal di atas, Oemar Hamalik mengemukakan bahwa Guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.⁸⁸

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Sehingga seorang guru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik secara profesional.

Seorang guru yang dapat menyanggah tugas profesional, seyogianya memiliki syarat-syarat berikut ini:

- a) Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pertumbuhan jiwa manusia dari segala segi dan sendinya, demikian pula dengan kegiatan belajar.
- b) Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang alam dan masyarakat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar khususnya dan pendidikan pada umumnya.
- c) Menguasai sepenuhnya pengetahuan dan kepahaman tentang vak (bidang disiplin ilmu/studi yang ia ajarkan).

⁸⁷ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 156-157.

⁸⁸ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 27.

d) Memiliki secukupnya pengetahuan dan pengalaman tentang seni mengajar.⁸⁹

Terkait dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengimplementasikan berbagai macam kompetensi guru.

G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keprofesionalan Guru

Globalisasi yang sedang berlangsung pada era sekarang ini, menuntut kesiapan secara optimal dari seluruh elemen bangsa, termasuk dalam hal ini adalah dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah, kehadiran seorang guru yang profesional sangat diharapkan, apalagi mengingat bahwa gurulah yang berada di garda terdepan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, keprofesionalan seorang guru perlu ditingkatkan.

Secara umum, peningkatan keprofesionalan guru dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya adalah:

a. Faktor internal

Faktor internal ialah faktor yang bersumber dari dalam diri guru itu sendiri. Adapun faktor internal tersebut, yaitu faktor potensi kognitif, afektif, dan faktor psikomotorik.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang bersumber dari luar diri guru. Faktor eksternal tersebut, yaitu faktor layanan supervisi kepala sekolah yang berbasis manajemen mutu terpadu.⁹⁰

⁸⁹Udin Syaifuddin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, h. 37-38.

⁹⁰Abdul Hadis dan Nurhayati B., *Manajemen Mutu Pendidikan*, h. 61.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keprofesionalan seorang guru dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri guru itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar guru.

Terkait dengan hal tersebut, keprofesionalan dalam suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting yaitu:

- 1) Keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi;
- 2) Kemampuan untuk memperbaiki keterampilan dan keahlian khusus yang dimiliki;
- 3) Penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki itu.⁹¹

Bertolak dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional harus memiliki berbagai macam keahlian dan kemampuan dalam bidang pendidikan.

Para ahli pendidikan, pada umumnya memasukkan guru sebagai tenaga profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.⁹²

Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesionalisme. Kemampuan profesionalisme guru, memiliki prinsip-prinsip tertentu. Agus Wibowo dan Harmin mengutip pendapat Agung Haryono

⁹¹ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Ed. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 181.

⁹² Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 156.

yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip profesionalisme guru adalah ketika seorang guru mampu menjalankan tugasnya secara profesional, di samping memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Ahli teori dan praktik keguruan.
- b) Senang memasuki organisasi profesi keguruan.
- c) Melindungi kepentingan anggotanya.
- d) Memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai.
- e) Melaksanakan kode etik guru.
- f) Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab.
- g) Memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat.
- h) Bekerja atas panggilan hati nurani.⁹³

Mengacu pada prinsip-prinsip profesionalisme guru di atas maka dapat dipahami bahwa untuk menjadi seorang guru yang profesional, tentu bukan suatu perkara yang mudah. Bahkan harus ditunjang oleh potensi dan kemampuan serta berbagai macam keahlian.

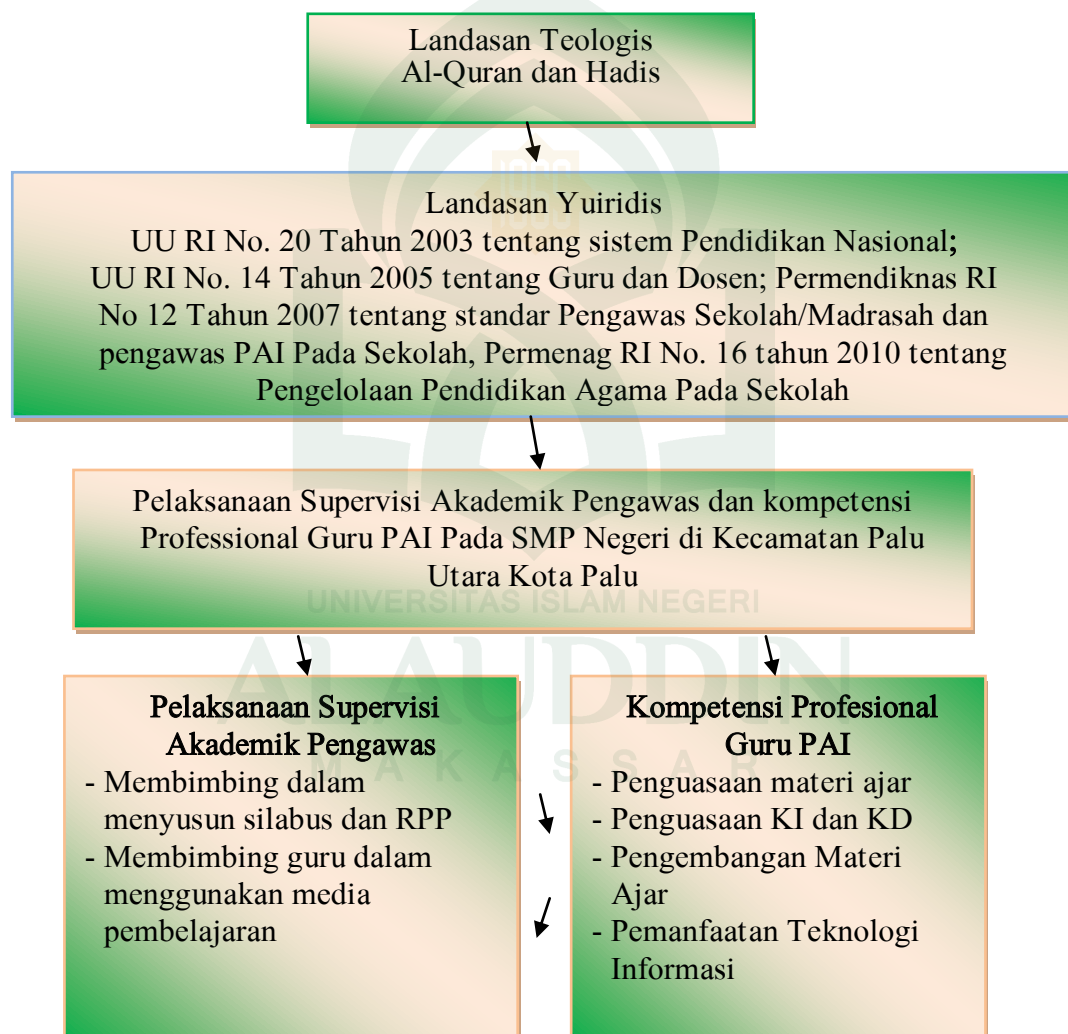
H. Kerangka Konseptual

Pengawas yang merupakan salah satu jabatan fungsional mempunyai peran yang strategis dan signifikan dalam melakukan supervisi. Supervisor dituntut kompetensinya dalam menjalankan supervisi secara efektif. Pelaksanaan supervisi akademik mengacu pada landasan teologis dan landasan yuridis. Landasan teologis yakni Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan landasan yuridis yakni UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru

⁹³ Agus Wibowo dan Harmin, *Menjadi Guru Berkarakter : Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 17.

dan Dosen, PP RI. No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, PP No. 12 Tahun 2007 tentang Pengawas Sekolah/Madrasah, PP No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut maka digambarkan pada bagan berikut:

Bagan Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹ Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.²

Penelitian ini memberikan gambaran tentang Pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru PAI pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

2. Lokasi Penelitian

Kecamatan Palu Utara adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kota Palu yang tepatnya berada di Sulawesi Tengah. Kota Palu awalnya adalah kota kecil

¹Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*(Bandung: Remaja Rosda karya, 2012), h. 6.

²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.

yang menjadi pusat kerajaan Palu. Setelah penjajahan Belanda maka kerajaan ini merupakan bagian dari wilayah kekuasaan, Onder Afdeling Palu. Pada saat Perang Dunia II sekitar tahun 1942 Kota Donggala sebagai ibukota Afdeling Donggala dihancurkan baik oleh pasukan Sekutu maupun Jepang sehingga pusat pemerintahan dialihkan ke Palu sekitar tahun 1950, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1950 menjadi wilayah daerah Sulawesi Tengah dan berkedudukan di Poso, sedangkan Kota Palu hanya merupakan tempat kedudukan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) setingkat Wedana. Lebih jauh Kota Palu berkembang setelah dibentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah Tahun 1957 membuat status Kota Palu menjadi Ibukota Karesidenan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 dengan terbentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, telah memberi arti dan peran yang lebih baik bagi Kota Palu karena menjadi Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Dengan semakin besarnya peran kota ini dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 maka Kota Palu ditetapkan menjadi Kota Administratif.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Palu yang mempunyai Wilayah meliputi : Kota Administratif Palu dan Sebagian wilayah Kecamatan Tavaili. Secara administratif Wilayah Kota Palu terdiri dari Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Palu Selatan.⁴

³Sumber Data: Kantor Bappeda Kota Palu Tahun 2014.

⁴Sumber Data: Kantor Bappeda Kota Palu Tahun 2014.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian dengan pertimbangan bahwa SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu adalah representasi dari SMP swasta lainnya di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, sepanjang pengetahuan penulis, penelitian ini belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang mengambil topik yang sama pada objek yang diteliti yakni pelaksanaan supervisi pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis, pendekatan pedagogis, pendekatan psikologis, dan pendekatan manajerial. Keempat pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pendekatan teologis normatif pada prinsipnya adalah pendekatan dasar yang diturunkan dari ajaran agama Islam.⁵
- b. Pendekatan pedagogis yaitu pendekatan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang berada dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani yang memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses pendidikan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan pedagogis digunakan untuk mengamati pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan guru SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu dalam menerapkan kompetensi profesionalnya.

⁵Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 47.

- c. Pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendalami berbagai gejala psikologis yang muncul dari pengawas dan guru PAI pada saat peneliti, pengawas dan guru melakukan interaksi.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat sistem manajerial pengawas dalam melaksanakan tugas supervisi seperti; merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan supervisi terhadap guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

C. Sumber Data

Artikulasi sumber data dalam penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, bila penelitian menggunakan teknik wawancara maka teknik datanya disebut informan, dan bila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.⁶

Sumber data penelitian ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; Pengawas, Kepala Sekolah, guru PAI yang dijadikan sasaran pengamatan dan informan yang lain yang penulis jadikan acuan penulisan tesis ini. Adapun Nama-nama Guru PAI dan Kepala Sekolah serta Pengawas PAI tersebut yang penulis deskripsikan dalam bentuk table yaitu:

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. 13; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

No	N a m a	J a b a t a n
1	Abu Thalib, S,Pd	Kepala Sekolah
2	Nurimtihan, S,Pd,I	Guru PAI
3	Harmiati. S,Pd.I	Guru PAI
4	Drs, Amran Mardjuku	Kepala Sekolah
5	Dra, Hj. Marhumi	Guru PAI
6	Muliani, S,Ag	Guru PAI
7	Dra, Aisyah	Guru PAI
8	Kalsum Lawira, S.Pd	Kepala Sekolah
9	Djafar Sahila, S,Pd	Kepala Sekolah
10	Hamka Hi. Salam S,Sos.I	Guru PAI
11	Hi, Abd Waris, M,Pd.I	Pengawas Depag
12	Hj, Ratna, S,Ag	Pengawas Depag

, dokumen atau catatan tertulis yaitu: buku pedoman akademik, kalender akademik, Perangkat pembelajaran guru, laporan pengawas, serta unsur pendukung lainnya.

Jenis data dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dilapangan melalui observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen, baik yang bersumber dari informan maupun data yang diperoleh pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu.

Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku teks (*teks books*), majalah, media cetak dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran dari berbagai kepustakaan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti dengan menggunakan berbagai metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan langsung ke obyek yang diteliti guna memperoleh gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti. Pedoman observasi yang dimaksud adalah pengamatan yang dilakukan secara sistimatis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala praktis yang kemudian dilakukan pencatatan.⁷ Dengan demikian observasi yang dilakukan dalam penelitian ini diarahkan pada pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan detail dan akurat secara langsung dari responden. Hal senada dikemukakan Lexy J. Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yaitu yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancara (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Responden

⁷Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXIX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.186.

dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penelitian yang ditujukan terkait dengan persoalan yang dikaji kepada responden, baik wawancara yang dilakukan dengan terstruktur maupun wawancara dengan tidak terstruktur yang meliputi: pokjawas, pengawas PAI, kepala sekolah, guru PAI, serta unsur penunjang lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.⁹ Dokumentasi yang dimaksudkan disini, antara lain adalah catatan peristiwa-peristiwa atau data evaluasi yang telah berlalu, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan berupa catatan-catatan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Sugiyono menyatakan, bahwa ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.¹⁰ Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri jika masalah belum jelas, tetapi karena masalah

⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 256.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 62.

sudah jelas, maka penulis mengembangkannya dengan pedoman observasi dan wawancara sebagai instrumen penelitian agar dapat menuntun penulis sekaligus dapat memperoleh informasi dari sumber data dengan bantuan mengisi *check list*.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis agar memperoleh data yang valid untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga tahap dalam melakukan analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Tahap ini penulis memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian ini. Data tersebut direduksi dengan mengedepankan data-data yang penting dan bermakna. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian maka gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini, penulis menyajikan hasil penelitian, bagaimana temuan-temuan baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasian dengan teori.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan terhadap data yang sudah disajikan, penulis membuat kesimpulan-kesimpulan, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan,

dianalisis dengan teknik induktif, yaitu data yang diperoleh/ditemukan dilapangan dianalisis kemudian menarik suatu kesimpulan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.¹¹

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

c. Triangulasi waktu

¹¹Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.¹²



¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 373.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS DAN
KOMPTENSI PROFSIONAL GURU PAI PADA SMP NEGERI
DI KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU

A. Kondisi Objektif Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas pada SMP
Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu

Pengawas merupakan salah satu pejabat fungsional yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas kepengawasan pada setiap satuan pendidikan. Proses supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar, hal ini tidak terlepas dari kemampuan, tanggung jawab, intensitas, produktifitas, dan ketrampilan atau *skill* yang dimiliki oleh pengawas dalam menjalankan tugas supervisi. Oleh karena itu, pengawas harus memiliki wawasan dan kemampuan profesional dalam bidang tugasnya. Pengawas harus mempunyai kompetensi, kualifikasi dan semangat kerja yang tinggi serta senantiasa mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satu kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik adalah kompetensi supervisi akademik. Kompetensi supervisi akademik sangat dibutuhkan oleh pengawas dalam melakukan kegiatan supervisi di sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik di sekolah, seorang pengawas harus memiliki kemampuan untuk membimbing guru dalam menyusun silabus, menyusun RPP, membimbing guru dalam menggunakan metode dan media pembelajaran.

Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang penulis identifikasi sebagai salah satu bentuk kondisi objektif pelaksanaan supervisi akademik pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, yaitu:

1. Membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP

Kegiatan membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh pengawas pada saat melakukan kegiatan supervisi di sekolah binaannya. Oleh karena itu, pengawas harus memiliki berbagai macam kompetensi. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan supervisi akademik seorang pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi supervisi akademik agar mampu membimbing guru dalam kegiatan pembelajaran.

Berkaitan dengan hal tersebut Abu Tholib, mengungkapkan bahwa ketika pengawas melakukan kegiatan supervisi di sekolah, jarang melakukan kegiatan pembimbingan terhadap dalam hal menyusun silabus dan RPP. Pengawas biasanya hanya datang di sekolah memantau sebentar lalu kemudian pulang. Jadi pengawas boleh dikatakan tidak pernah melakukan kegiatan pembimbingan terhadap guru tersebut. Guru di sekolah kebanyakan memperoleh ilmu pengetahuan tentang cara menyusun silabus dan RPP dari kegiatan MGMP yang dilakukan secara rutin.¹

Ungkapan tersebut dipertegas oleh Nur Imtihan yang menyatakan:

Saya selaku guru Pendidikan Agama Islam di sekolah ini, sangat sulit menilai sejauh mana kemampuan pengawas dalam membimbing kami dalam hal menyusun silabus dan RPP karena pengawas yang bertugas di sekolah ini ketika melakukan kegiatan supervisi kebanyakan hanya datang saja memantau sebentar lalu pulang dan jarang melakukan pembimbingan kepada kami khususnya dalam menyusun silabus dan RPP, itu pun kalau sempat dibimbing, durasi waktunya hanya sebentar sehingga sama saja tidak ada manfaatnya.²

¹Abu Tholib, Kepala SMPN 22 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 2 April 2014.

²Nur Imtihan, Guru PAI SMPN 22 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 2 April 2014.

Senada dengan pernyataan tersebut Amran Mardjuki Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Palu menuturkan bahwa pada saat pengawas melakukan kegiatan supervisi di sekolah, tidak pernah melakukan kegiatan pembimbingan terhadap guru, khususnya yang terkait dengan penyusunan silabus dan RPP. Ini menunjukkan bahwa pengawas kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.³

Penuturan tersebut ditambahkan oleh Kalsum Lawira, Guru PAI yang mengungkapkan bahwa bagaimana mungkin bisa membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP kalau dia hanya datang di sekolah sebentar lalu pulang. Jarang tinggal lama untuk menggunakan waktunya melakukan pembimbingan terhadap guru.⁴

Pengawas yang merupakan salah satu faktor determinan dalam mencapai keberhasilan pendidikan di sekolah sangat diharapkan kemampuannya dalam membimbing guru karena pengawas merupakan gurunya guru. Artinya bahwa seorang pengawas harus memiliki kompetensi yang lebih dibanding daripada guru karena apabila seorang guru lebih pintar daripada pengawas maka tentu sangat sulit seorang pengawas untuk melakukan pembimbingan terhadap guru tersebut.

Berangkat dari hasil wawancara yang penulis peroleh dari Harmiati dia menuturkan:

Saya selaku guru Pendidikan Agama Islam di sekolah ini, tidak pernah merasa dibimbing oleh pengawas dalam hal menyusun silabus dan RPP karena mereka ketika datang mensupervisi kami di sekolah, hanya sebentar saja dan hasil

³Amran Mardjuki, Kepala SMPN 17 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 7 Mei 2014.

⁴Kalsum Lawira, Kepala SMPN 16 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 4 Juni 2014.

pembimbingan yang dilakukan oleh pengawas tidak maksimal sehingga tidak ada peningkatan ilmu yang diperoleh dari pengawas tersebut.⁵

Penuturan tersebut dipertegas oleh pengawas, yaitu Abdul Waris Hasan Pengawas Depag mengatakan bahwa untuk membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP secara kontinyu waktunya sangat terbatas karena wilayah binaan sekolah yang dipercayakan untuk dibina termasuk banyak jumlahnya sementara pengawas hanya satu orang jadi sesungguhnya untuk melakukan pembimbing kepada guru secara intens, sangat sulit. Selain itu, guru juga sering mengikuti kegiatan MGMP dan di situlah sebenarnya kesempatan untuk latihan menyusun silabus dan RPP.⁶

Hasil wawancara dari beberapa informan tersebut, diperjelas oleh hasil observasi penulis di lapangan bahwa pengawas yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu apabila melakukan kegiatan supervisi akademik, jarang melakukan kegiatan pembimbingan kepada guru, khususnya dalam penyusunan silabus dan RPP. Sehingga wajar kalau guru kurang berkompten dalam hal penyusunan silabus dan RPP. Hal tersebut terlihat ketika melakukan supervisi akademik pada sekolah yang menjadi wilayah binaannya kebanyakan kegiatan yang dilakukan pengawas tersebut hanya datang memantau guru dalam proses pembelajaran lalu kemudian pulang. Walaupun sempat membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP durasi waktunya sangat singkat sehingga guru tidak memperoleh hasil peningkatan ilmu dari pengawas tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan tersebut maka

⁵Harmiati, Guru PAI SMPN 16 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 4 Juni 2014.

⁶Abdul Waris Hasan, Pengawas Kemenag Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 8 Mei 2014.

dapat disimpulkan bahwa kondisi objektif pelaksanaan supervisi akademik pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, khususnya yang terkait dengan membimbing guru dalam menyusun silabus dan RPP belum berjalan dengan maksimal. Hal ini juga Tentunya disebabkan oleh Faktor Kompetensi Pengawas yang belum memiliki kemampuan dalam bidangnya.

2. Membimbing guru menggunakan metode pembelajaran

Kemampuan pengawas membimbing guru dalam menggunakan metode pembelajaran merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan supervisi akademik pengawas. Oleh karena itu, sorang pengawas harus memiliki kemampuan dan untuk membimbing guru dalam menggunakan metode pembelajaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketika penulis melakukan observasi dan wawancara dari beberapa informan ditemukan beberapa hasil penelitian sebagaimana yang di ungkapkan oleh Djafar Sahila bahwa ketika pengawas melakukan kegiatan supervisi di sekolah, hampir tidak pernah membimbing guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Pengawas kebanyakan hanya datang melihat proses pembelajaran lalu pulang. Sehingga apabila pengawas yang diharapkan untuk membimbing guru dalam menggunakan metode pembelajaran maka guru akan ketinggalan kreativitas dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran.⁷

Ungkapan tersebut diperjelas oleh salah satu informan dari guru Pendidikan Agama Islam, yaitu Marhumi yang menyatakan:

Selama saya mengajar di sekolah ini jarang sekali pengawas membimbing saya dalam hal penggunaan metode pembelajaran karena ketika pengawas datang

⁷Djafar Sahila, Kepala SMPN 18 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 9 April 2014.

mensupervisi di sekolah, hampir tidak ada waktu untuk fokus membimbing kami dalam hal penggunaan metode pembelajaran. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang diperoleh mengenai cara penggunaan metode pembelajaran yang efektif dan efisien kebanyakan dari hasil pelatihan-pelatihan yang sering dilakukan, seperti pelatihan *workshop* MGMP.⁸

Kedudukan pengawas dalam dunia pendidikan pada hakikatnya juga adalah guru namun kemampuannya harus melebihi dari pada guru dan kepala sekolah karena pengawas adalah gurunya guru, sehingga sasaran mengajarnya adalah membina kepala sekolah dan guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, oleh karena itu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh guru secara otomatis pengawas juga harus melakukannya, kalau guru harus membuat prota, prosem RPP dan lain sebagainya maka pengawas pun juga harus melakukannya. Terkait dengan hal tersebut dalam supervisi, penyusunan program merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebaik-baiknya. Penyusunan program yang kurang baik akan berimplikasi pada objek pelaksanaan program.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari sekretariat Pengawas PAI Kemenag Kota Palu berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pengawas maka penulis menelusuri melalui program kerja yang dibuat oleh pengawas Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 4.6

**Program Kerja Tahunan Pengawas pada SMP Negeri
di Kecamatan Palu Utara Kota Palu Tahun 2013/2014**

NO	KEGIATAN	VOLUME
1	Membuat SK untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas dalam jangka satu tahun	1 Kegiatan

⁸Marhumi, Guru PAI SMPN 18 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 9 April 2014.

2	Menyusun program kerja pengawas yang menjadi tanggung jawab PAI	1 Kegiatan
3	Melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar siswa dan kemampuan guru PAI	2 Kegiatan
4	Mengumpulkan dan mengolah data sekolah, siswa dan sumber daya pendidikan, PBM, bimbingan dilingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan dan hasil belajar serta bimbingan siswa	1 Kegiatan
5	Memberikan arahan terhadap guru PAI tentang pelaksanaan PBM dan bimbingan siswa melalui MGMP (Pemberdayaan MGMP)	1 Kegiatan
6	Memberikan contoh pelaksanaan tugas guru PAI dalam melaksanakan PBM dan bimbingan siswa	1 Kegiatan
7	Memantau perkembangan pelaksanaan kurikulum	1 Kegiatan
8	Melaksanakan analisis komprehensif hasil dan bimbingan belajar siswa dan cara mempertimbangkan berbagai faktor sumber daya pendidikan yang kompleks termasuk korelasi kemampuan guru dengan hasil belajar dan bimbingan siswa	1 Kegiatan
9	Melaksanakan supervisi dan monitoring untuk memotivasi guru PAI dalam melaksanakan tugasnya	9 Kegiatan
10	Memberikan motivasi kepada guru PAI untuk meningkatkan kinerjanya dan semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya	1 Kegiatan
11	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ekstra kurikuler PAI di sekolah	2 Kegiatan
12	Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan PAI di seluruh sekolah	2 Kegiatan
13	Menyusun laporan bulanan, semester, tahunan hasil pengawasan pelaksanaan PAI pada setiap sekolah	12 Kegiatan

Sumber Data: Pengawas PAI Kota Palu Tahun 2014

Program kerja tersebut menggambarkan tentang tahap kegiatan pengawas mulai dari tahap perencanaan yaitu menyusun rencana program supervisi dan menyusun instrumen supervisi yang akan digunakan saat kunjungan ke sekolah, selanjutnya tahap pelaksanaan tugas yaitu pemantauan dan pembinaan 8 standar nasional pendidikan di sekolah, tahap evaluasi dan tahap pelaporan.

Program tahunan kerja pengawas tersebut kemudian dijabarkan oleh pengawas dalam program kerja semester. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang program semester pengawas akan dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Program Kerja Pengawas Semester Ganjil

Tahun 2013/2014

No	Jenis Kegiatan	Rencana Kegiatan
1.	Membuat jadwal kegiatan dan blanko pelaksanaan kepengawasan	Minggu ke 1 bulan juli tahun 2013
2.	Melaksanakan pendataan sekolah guru dan siswa di SMP, SMA, dan SMK	Minggu ke 3 dan 4 bulan juli dan minggu 2,3,4 bulan september 2013
3.	Menyusun daftar sekolah, guru dan siswa di SMP, SMA dan SMK	Minggu ke 4 dan 5 bulan September 2013
4.	Supervisi/observasi PROFESIONAL guru PAI di SMP,SMA dan SMK	Minggu ke 1,2 dan ke 3 bulan oktober 2013 (3 minggu)
5.	Supervisi kegiatan bulan Ramadhan	Minggu ke 2,3,4,5 pada bulan agustus 2013
6.	Monitoring administrasi pembelajaran guru PAI di SMP,SMA dan SMK	Minggu ke 4,5 bulan oktober dan minggu ke 1 bulan Nopember 2013
7.	Pengamatan proses pembelajaran untuk guru PAI di SMP, SMA dan SMK	Minggu ke 2,3 dan 4 bulan Nopember 2013
8.	Monitoring pelaksanaan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta pembinaan akhlak karimah	Minggu ke 1 dan 2 bulan desember 2013
9.	Monitoring pelaksanaan semester ganjil di SMP,SMA dan SMK	Minggu 3 dan 4 bulan desember 2013
10.	Monitoring pelaksanaan eskul di SMP, SMA dan SMK	Minggu ke 5 bulan Nopember dan minggu ke 1 bulan desember 2013

Sumber Data: Sekretariat Pengawas Kantor Kemenag Kota Palu Tahun 2014.

Tabel 4.8
Program Kerja Pengawas Semester Genap
Tahun 2013/2014

No	Jenis Kegiatan	Sasaran dan Target
1.	Membuat jadwal kegiatan surat tugas dari Kemenag Kota Palu	Mengarahkan tentang fungsi dan peran lingkungan sekolah yang bernuansa Islami
2.	Pengamatan PBM untuk guru PAI di SMP, SMA dan SMK (Lanjutan)	Menganalisis daftar isian dan catatan hasil pengawasan masing-masing sekolah
3.	Supervisi kemampuan siswa membaca Al-quran	Menganalisis daftar isian dan catatan hasil pengawasan seluruh sekolah
4.	Supervisi kemampuan siswa melakukan shalat di SMP, SMA dan SMK	Monitoring dan supervisi, daftar isian
5.	Monitoring pelaksanaan try out	Monitoring, supervisi, dan pendataan
6.	Monitoring pelaksanaan ujian praktek	Diskusi dalam kunjungan khusus
7.	Monitoring pelaksanaan ujian sekolah	Monitoring, supervisi/pembimbingan
8.	Monitoring pelaksanaan UN	Menyusun dan menganalisis catatan hasil pengawasan mata pelajaran PAI.
9	Monitoring pelaksanaan Eskul Keagamaan	
10	Monitoring pelaksanaan ujian semester 2	
11	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepengawasan	
12	Menyusun program kerja untuk tahun berikutnya	

Sumber Data: Sekretariat Pengawas Kantor Kemenag Kota Palu Tahun 2014.

Mencermati keterangan kedua tabel di atas, menunjukkan bahwa rumusan program kerja pengawas terperinci dalam bentuk kegiatan dengan sasaran dan target pencapaian realisasi program yang terdiri dari program kerja semester ganjil dan program kerja semester genap tersusun secara sistematis dari perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, dan evaluasi atau pelaporan hasil supervisi.

Apabila mengamati program kerja yang telah dibuat oleh pengawas yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu sudah termasuk kategori

bagus namun apabila dilihat dari aspek hasil implementasinya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, seharusnya pengawas melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada agenda program kerja yang telah disusun. Dengan begitu maka tentu akan mampu memperoleh hasil kinerja yang baik, khususnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam di sekolah. Selain itu, seorang pengawas harus didukung oleh kompetensi yang memadai, seperti ketika akan melakukan supervisi akademik maka minimal harus menguasai kompetensi supervisi akademik.

Sehubungan dengan pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, khususnya yang terkait dengan kegiatan pembimbingan guru dalam menggunakan metode pembelajaran, Abu Tholib menuturkan bahwa dalam pelaksanaan supervisi pengawas di sekolah, pengawas jarang melakukan kegiatan pembimbingan terhadap guru. Itu pun kalau pengawas sempat membimbing, waktunya sangat terbatas sehingga pengawas belum mampu memberikan hasil pembimbingan secara optimal kepada guru.⁹

Penuturan dari informan tersebut diakui oleh pengawas yang menyatakan:

Saya selaku pengawas yang bertugas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu mengakui bahwa untuk membimbing guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah sangat kewalahan karena saya hanya sendiri pengawas yang bertugas di sekolah tersebut lalu setiap sekolah yang menjadi wilayah binaan saya rata-rata tempatnya berjauhan. Sehingga untuk membimbing guru secara intens dalam hal penggunaan metode pembelajaran sangat sulit.¹⁰

⁹Abu Tholib, Kepala SMPN 22 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 2 April 2014.

¹⁰Abdul Waris, Pengawas Kemenag Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 8 Mei 2014.

Menjadi seorang pengawas yang profesional, cukup hanya memiliki ilmu pengetahuan tentang kepengawasan, akan tetapi juga diperlukan adanya kemampuan profesional dalam mengatur waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Apalagi menaungi beberapa sekolah yang lokasinya berjauhan tentu membutuhkan strategi yang tepat untuk mengatur waktu tersebut. Selain itu harus pula didukung oleh berbagai macam kompetensi, Misalnya ketika akan melakukan supervisi akademik di sekolah maka seorang pengawas minimal harus memiliki kompetensi supervisi akademik.

Berkenaan dengan kondisi objektif pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas, khususnya pengawas yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu dapat dideskripsikan sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan, yaitu Djafar Sahila mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas, khususnya yang terkait dengan kegiatan pembimbingan guru dalam menggunakan metode pembelajaran, belum berjalan sesuai dengan harapan. Artinya bahwa pengawas tersebut belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal pembimbingan guru yang terkait dengan penggunaan metode pembelajaran di sekolah. Hal tersebut disebabkan karena mereka ketika datang di sekolah kebanyakan hanya datang duduk berbica di kantor kepala sekolah lalu kemudian pulang.¹¹

Ungkapan tersebut ditambahkan oleh Amran Mardjuki yang menyatakan bahwa pengawas yang bertugas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara

¹¹Djafar Sahila, Kepala SMPN 18 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 9 April 2014.

Kota Palu, apabila ditinjau dari aspek pelaksanaan supervisi akademiknya, khususnya yang terkait dengan kegiatan membimbing guru dalam menggunakan metode pembelajaran, belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengawas tersebut seharusnya melanjutkan jenjang kependidikannya minimal magister karena kalau pengawas hanya sarjana maka ilmunya tidak cukup untuk membimbing guru dan kepala sekolah yang sudah memiliki kualifikasi akademik magister nantinya.¹²

Penjelasan dari beberapa informan tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis di lapangan bahwa pengawas yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, ketika melakukan supervisi akademik kebanyakan hanya datang di sekolah memantau dan jarang melakukan kegiatan pembimbingan langsung kepada guru. Itu pun kalau sempat membimbing guru dalam menggunakan metode pembelajaran, durasi waktunya sangat minim sehingga hasilnya tidak signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru profesional guru Pendidikan Agama Islam di sekolah. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa pengawas yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu masih memiliki tingkat kemampuan melaksanakan supervisi akademik yang rendah, khususnya dalam hal membimbing guru untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran.

3. Membimbing guru menggunakan media pembelajaran

Tugas seorang pengawas memiliki cakupan yang sangat luas. Salah satu di antaranya adalah membimbing guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Salah satu kegiatan pembimbingan yang harus dilakukan oleh pengawas

¹²Amran Mardjuki, Kepala SMPN 17 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 7 Mei 2014.

terhadap guru di sekolah, misalnya membimbing guru dalam menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu, pengawas harus memiliki berbagai kemampuan dan keahlian untuk membimbing guru dalam menggunakan media pembelajaran di sekolah.

Terkait dengan hal tersebut, kegiatan pembimbingan yang dimiliki oleh pengawas di sekolah, khususnya kegiatan membimbing guru menggunakan media pembelajaran pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu dapat digambarkan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan, yaitu Kalsum Lawira menuturkan bahwa dalam pelaksanaan supervisi akademik di sekolah, khususnya kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dalam membimbing guru menggunakan media pembelajaran belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan karena pengawas sendiri memiliki kemampuan yang sangat terbatas terkait dengan cara menggunakan media pembelajaran, khususnya yang terkait dengan teknologi informasi.¹³

Penuturan tersebut diperkuat oleh ungkapan Muliani yang menyatakan:

Kemampuan pengawas dalam membimbing saya untuk menggunakan media pembelajaran di sekolah boleh dikatakan masih rendah. Hal ini terbukti ketika melakukan supervisi di sekolah kami, pengawas kurang mampu membimbing saya dalam menggunakan media pembelajaran apalagi media pembelajaran yang terkait dengan teknologi informasi, seperti *lap top* pengawas sendiri belum terlalu menguasai hal tersebut.¹⁴

Seorang pengawas yang diberi tugas membimbing guru, harus memiliki kemampuan untuk membimbing guru dalam menggunakan media pembelajaran karena seorang guru yang menjadi tanggung jawab binaannya harus dibimbing

¹³Kalsum Lawira, Kepala SMPN 16 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 4 Juni 2014.

¹⁴Muliani, Guru PAI SMPN 16 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 4 Juni 2014.

dengan baik. Apalagi mengenai media pembelajaran, khususnya yang terkait dengan teknologi informasi harus dikuasai oleh seorang pengawas..

Sehubungan dengan hal tersebut, Abu Tholib menambahkan bahwa pengawas yang direkrut oleh pemerintah harus diseleksi karena seorang pengawas merupakan gurunya guru. Artinya bahwa perekrutan pengawas tidak boleh senbarangan dan harus benar-benar memiliki kemampuan yang lebih dibanding guru sehingga dapat melakukan kegiatan pembimbingan kepada kepala sekolah maupun guru. Seperti pengawas yang ada sekarang ini, kemampuannya masih sangat terbatas dalam membimbing guru menggunakan berbagai media pembelajaran apalagi yang terkait dengan teknologi informasi.¹⁵

Senada dengan ungkapan tersebut Amran Mardjuki menuturkan pula bahwa kemampuan pengawas untuk membimbing guru dalam menggunakan media pembelajaran masih termasuk rendah, terutama penggunaan media yang terkait dengan teknologi informasi boleh dikatakan guru masih lebih pintar dibanding daripada pengawas. Oleh karena itu, pengawas harus banyak belajar untuk lebih menguasai penggunaan media pembelajaran.¹⁶

Penuturan di atas diakui oleh pengawas, yaitu Abdul Waris yang mengatakan:

Saya selaku pengawas di sekolah ini, jarang melakukan pembimbingan kepada guru mengenai penggunaan media pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi karena saya selaku pengawas belum terlalu menguasai masalah teknologi informasi. Oleh karena itu saya tetap selalu berupaya untuk mampu menguasai masalah penggunaan media pembelajaran yang terkait dengan teknologi informasi.¹⁷

¹⁵ Abu Tholib, Kepala SMPN 22 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 2 April 2014.

¹⁶ Amran Mardjuki, Kepala SMPN 17 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 7 Mei 2014.

¹⁷ Abdul Waris, Pengawas Kemenag Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 8 Mei 2014.

Penuturan dari beberapa informan tersebut, dipetegas oleh hasil observasi penulis di lapangan bahwa kemampuan pengawas membimbing guru dalam menggunakan media pembelajaran, khususnya yang terkait dengan teknologi informasi masih termasuk rendah. Oleh karena itu, perlu ada pembimbingan khusus yang diberikan oleh pengawas terkait dengan cara menggunakan media pembelajaran yang terkait dengan teknologi informasi. Dengan begitu maka penulis berkesimpulan bahwa pengawas yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu masih memiliki tingkat kemampuan yang rendah, khususnya dalam membimbing guru menggunakan berbagai media pembelajaran.

B. Gambaran Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu

Guru yang profesional merupakan dambaan bagi semua pelaku pendidikan. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional diharapkan memiliki berbagai macam kompetensi. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional seorang guru dapat diukur dari kemampuannya menguasai materi ajar, kemampuan menguasai KI dan KD, kemampuannya mengembangkan materi ajar, dan kemampuannya memanfaatkan teknologi informasi.

1. Kemampuan menguasai materi ajar

Kemampuan menguasai materi ajar merupakan salah satu indikator dari kompetensi profesional seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kompetensi profesional.

Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu dalam menguasai materi ajar dapat digambarkan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara penulis dari beberapa informan salah satunya adalah bapak abu thalib yang merupakan kepala sekolah pada Smp Negeri 22 Palu, Abu Tholib mengungkapkan bahwa kemampuan guru dalam menguasai materi ajar sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat ketika membawakan materi ajar di kelas mereka mampu menyampaikan materi ajar yang bisa membuat peserta didik cepat memahami materi tersebut. Sekalipun demikian tetap harus ditingkatkan lagi karena terkadang juga ada materi-materi tertentu yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat disampaikan kepada peserta didik dengan baik.¹⁸

Senada dengan ungkapan tersebut Djafar Sahila yang juga merupakan Kepala Sekolah Pada Smp Negeri 18 Palu menyatakan bahwa kemampuan guru PAI dalam menguasai materi ajar sudah termasuk baik. Hal tersebut terlihat kemampuannya dalam memberikan materi kepada peserta didik, mereka sudah bisa menjelaskan materi kepada peserta didik sesuai dengan indikator-indikator materi ajar tersebut sehingga hasil dan tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan.¹⁹

Guru sebagai pendidik profesional harus memiliki berbagai macam kemampuan. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan menguasai materi pem-

¹⁸ Abu Tholib, Kepala SMPN 22 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 2 April 2014.

¹⁹ Djafar Sahila, Kepala SMPN 18 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 9 April 2014.

belajaran. Apabila seorang guru memiliki kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran maka tentu akan mudah menyampaikan materi ajar dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut Amran Mardjuki menuturkan bahwa berkenaan dengan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam menguasai materi ajar tidak perlu diragukan lagi karena mereka semuanya mengajar sesuai dengan bidangnya. Walaupun mereka jarang mendapat bimbingan dari pengawas akan tetapi mereka sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi guru.²⁰

Lain halnya yang diungkapkan oleh Kalsum Lawira bahwa berkaitan dengan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai materi ajar masih perlu ditingkatkan karena masih ada yang sering ditemukan mengajar kurang menguasai materi ajar yang disampaikan kepada peserta didik.²¹

Penuturan beberapa informan tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis di lapangan bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai materi ajar pembelajaran dominan sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan yang dimilikinya dalam menjelaskan materi ajar sesuai dengan indikator-indikator dari materi tersebut. Sekalipun demikian tetap masih perlu ditingkatkan karena masih ada yang ditemukan guru yang belum mampu menguasai materi ajar secara maksimal. Dengan begitu maka penulis menyimpulkan bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai materi ajar pada umumnya sudah baik.

2. Kemampuan menguasai KI dan KD

²⁰Amran Mardjuki, Kepala SMPN 17 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 7 Mei 2014.

²¹Kalsum Lawira, Kepala SMPN 16 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 4 Juni 2014.

Kemampuan guru dalam menguasai KI dan KD sangat diharapkan dalam kegiatan pembelajaran. Apabila seorang guru memiliki kemampuan menguasai KI dan KD maka tentu akan mudah untuk menjabarkan KI dan KD ke dalam bentuk uraian materi secara sistimatis sehingga mampu indikator-indikator materi ajar tersebut dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut kemampuan guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu dalam menguasai KI dan KD dapat dideskripsikan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara penulis dari beberapa informan, yaitu Abu Tholib menyatakan bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai KI dan KD, sudah termasuk baik. Hal tersebut terlihat ketika dalam proses pembelajaran, mereka sudah mampu menjabarkan KI dan KD ke dalam bentuk materi ajar untuk disampaikan kepada peserta didik dengan baik.²²

Senada dengan ungkapan tersebut Amran Mardjuki menuturkan bahwa berkaitan dengan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai KI dan KD boleh dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat perangkat pembelajaran yang telah dibuatnya dalam bentuk RPP sudah mampu menguraikan KI dan KD sesuai dengan materi ajar yang disampaikan kepada peserta didik tersebut.²³

Bebeda Halnya yang diungkapkan oleh Kalsum Lawira bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai KI dan KD masih sangat terbatas. Hal tersebut terbukti ketika melakukan kegiatan pembelajaran, kurang

²² Abu Tholib, Kepala SMPN 22 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 2 April 2014.

²³ Amran Mardjuki, Kepala SMPN 17 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 7 Mei 2014.

mampu menyampaikan materi ajar sesuai dengan penjabaran dari KI dan KD tersebut.²⁴

Kemampuan guru dalam menguasai KI dan KD sangat dibutuhkan dalam upaya menyampaikan materi ajar secara efektif dan efisien. Apabila seorang guru menguasai hal tersebut maka tentu akan mudah menentukan indikator-indikator materi ajara yang akan disampaikan kepada peserta didik tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Ismail menuturkan bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai KI dan KD sebagian besar sudah ternasuk baik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelatihan-pelatihan yang selalu diikuti oleh guru yang terkait dengan peningkatan kompetensi guru.²⁵

Pernyataan dari beberapa informan tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis di lapangan bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai KI dan KD dominan sudah baik. Hal tersebut terlihat dari kemampuannya dalam menjabarkan KI dan KD ke dalam bentuk uraian materi ajar sudah terlaksana sesuai dengan indikator-indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan begitu penulis menyimpulkan bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam menguasai KI dan KD dominan sudah bagus.

3. Kemampuan mengembangkan materi ajar

Kemampuan mengembangkan materi ajar merupakan salah satu indikator dari kometensi profesional seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru harus

²⁴Kalsum Lawira, Kepala SMPN 16 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 4 Juni 2014.

²⁵Abdul Waris, Pengawas Kemenag Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 8 Mei 2014.

memiliki berbagai macam kemampuan dan keahlian dalam menerapkan kompetensi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut kemampuan guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu dalam mengembangkan materi ajar dapat diuraikan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara penulis dari beberapa informan yaitu Abu Tholib mengungkapkan bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan materi ajar sudah termasuk baik. Hal tersebut terlihat dari kemampuannya dalam menyampaikan materi ajar kepada peserta didik, mereka mampu mengembangkan materi ajar secara luas yang bisa labuh memudahkan peserta didik dalam memahami materi tersebut.²⁶

Senada dengan ungkapan tersebut, Djafar Sahila mengatakan pula bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan materi ajar sudah cukup memadai. Hal tersebut terlihat ketika melakukan kegiatan pembelajaran, mampu mengembangkan materi ajar sesuai dengan perkembangan peserta didik sehingga peserta didik termotivasi dan lebih mudah untuk memahami materi tersebut.²⁷

Lain halnya yang diungkapkan oleh Kalsum Lawira bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan materi ajar, masih perlu ditingkatkan lagi karena terkadang ditemukan mengajar kurang mampu mengembangkan materi ajar sesuai dengan perkembangan peserta didik.

²⁶Abu Tholib, Kepala SMPN 22 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 2 April 2014.

²⁷Djafar Sahila, Kepala SMPN 18 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 9 April 2014.

Ungkapan tersebut ditambahkan oleh Abdul Waris yang menyatakan bahwa berkenaan dengan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam, khususnya yang terkait dengan kemampuan mengembangkan materi ajar, secara umum sudah memiliki tingkat kemampuan yang baik. Hal tersebut terlihat ketika mereka menyampaikan materi ajar kepada peserta didik, mereka sudah mampu mengembangkan materi ajar sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.²⁸

Pernyataan dari beberapa informan tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis di lapangan bahwa guru Pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan materi ajar memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang sudah baik, cukup baik dan ada juga yang masih kurang baik. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu masih perlu berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan materi ajar.

4. Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi

Melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih maka seorang guru yang profesional dituntut untuk menguasai hal tersebut. Oleh karena itu, seorang guru harus berupaya untuk meningkatkan kompetensinya, khususnya di bidang kompetensi perifesimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam memanfaatkan teknologi informasi, dapat digambarkan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara penulis dari beberapa informan yaitu Abu Tholib menuturkan bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam

²⁸ Abdul Waris, Pengawas Kermenag Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 8 Mei 2014.

dalam memanfaatkan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan karena mereka belum terlalu mahir dalam memanfaatkan teknologi informasi.²⁹

Senada dengan ungkapan tersebut, Djafar Sahila mengatakan pula bahwa kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam memanfaatkan teknologi informasi seperti lap top, internet, masih termasuk minim sehingga tetap masih perlu banyak mempelajari tentang cara pemanfaatan teknologi informasi.³⁰

Ungkapan tersebut ditambahkan oleh Abdul Waris yang mengakui bahwa berkenaan dengan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam, khususnya yang terkait dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi sudah cukup baik dibanding daripada saya. Artinya bahwa tingkat kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi lebih tinggi dibanding daripada saya selaku pengawas.³¹

Pernyataan dari beberapa informan tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis di lapangan bahwa tingkat kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam memanfaatkan teknologi informasi sangat bervariasi. Ada yang sudah baik, cukup baik dan ada juga yang masih kurang baik. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu masih perlu berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi informasi.

²⁹ Abu Tholib, Kepala SMPN 22 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 2 April 2014.

³⁰ Djafar Sahila, Kepala SMPN 18 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 9 April 2014.

³¹ Abdul Waris, Pengawas Kermenag Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 8 Mei 2014.

C. Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PAI pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu serta Solusinya.

1. Faktor peluang

Peluang pelaksanaan supervisi akademik pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu didukung oleh beberapa faktor yaitu:

a. Sertifikasi

Sertifikasi pendidikan merupakan salah satu peluang pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan di Kota Palu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kalsum Lawira bahwa pengawas yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu sudah disertifikasi oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya sertifikasi tersebut dapat memberi peluang pengawas dalam melaksanakan tugasnya.³²

Ungkapan tersebut ditambahkan oleh Abdul Waris yang mengatakan:

Saya selaku pengawas di sekolah ini, alhamdulillah sudah disertifikasi oleh pemerintah. Dengan adanya sertifikasi tersebut dapat menambah motivasi diri untuk lebih tekun melaksanakan tugas kepengawasan.³³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sertifikasi pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu maka merupakan salah satu peluang pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam.

b. Kesejahteraan Pengawas

³²Kalsum Lawira, Kepala SMPN 16 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 4 Juni 2014.

³³Abdul Waris, Pengawas Kemenag Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 19 Februari 2014.

Salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengawas adalah dalam bentuk pemberian biaya operasional untuk kebutuhan di lapangan sebesar lima juta rupiah per tahun, pemberian tunjangan sertifikasi pengawas satu kali gaji pokok yang besarnya bervariasi setiap pengawas. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Waris bahwa perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terhadap pengawas alhamdulillah termasuk baik, seperti masalah kesejahteraan alhamdulillah sudah lebih dari cukup karena ada jaminan sertifikasi yang dibayarkan per tiga bulan.³⁴

Mencermati pernyataan tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa kesejahteraan pengawas merupakan salah satu peluang pelaksanaan supervisi akademik pengawas.

2. Faktor tantangan

Adapun tantangan pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, yaitu:

a. Kualifikasi akademik

Kualifikasi akademik merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pengawas. Oleh karena itu, seorang pengawas harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister.

Terkait dengan hal tersebut kualifikasi akademik pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu dapat dideskripsikan sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yaitu Abu Tholib menyatakan bahwa pengawas yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu sudah berkualifikasi

³⁴ Abdul Waris, Pengawas Kermenag Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 8 Mei 2014.

Sarjana. Kualifikasi tersebut sesungguhnya tidak cukup bagi pengawas karena pengawas merupakan gurunya. Sementara guru sendiri sudah memiliki kualifikasi sarjana. Jadi seharusnya seorang pengawas harus lebih tinggi kualifikasi akademiknya dibanding daripada guru.³⁵

Lebih lanjut Kalsum Lawira mengatakan bahwa pengawas saat ini dituntut memiliki kualifikasi akademik minimal magister karena sekarang guru diharuskan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana sehingga seorang pengawas sebagai gurunya guru harus kualifikasi akademiknya lebih tinggi daripada guru.³⁶

Penuturan tersebut diperkuat oleh hasil observasi penulis melalui data dokumentasi bahwa pengawas yang bertugas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu kualifikasi akademiknya baru mencapai tingkat sarjana. Oleh karena itu, wajar saja apabila pengawas kurang mampu membimbing guru dalam kegiatan pembelajaran guru sehingga kualifikasi akademik merupakan salah satu tantangan pelaksanaan supervisi akademik pengawas.

b. Kompetensi

Kompetensi merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki oleh seorang pengawas dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya. Oleh karena itu, selaku seorang pengawas harus memiliki berbagai macam kompetensi.

Kompetensi yang dimiliki oleh pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu merupakan salah satu tantangan pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik karena pengawas tersebut hanya memiliki

³⁵Abu Tholib, Kepala SMPN 22 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 2 April 2014.

³⁶Kalsum Lawira, Kepala SMPN 16 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 4 Juni 2014.

kualifikasi akademik sarjana sehingga kompetensinya masih terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh Amran Mardjuki bahwa pengawas yang bertugas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu hanya memiliki kualifikasi akademik sarjana sehingga kompetensinya masih di bawah standar bahkan banyak guru yang lebih baik tingkat kompoetensinya dibanding daripada pengawas.³⁷

Ungkapan tersebut ditambahkan oleh Djafar Sahila yang menyatakan bahwa walaupun pengawas sudah memiliki kualifikasi akademik sarjana namun apabila dilihat dari kompetensinya, pengawas masih memiliki kompetensi yang rendah. Hal ini terlihat dari kemampuannya dalam melakukan pembinaan terhadap guru belum maksimal.³⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis peroleh dari beberapa informan tersebut menunjukan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pengawas yang ada pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas.

Pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam melaksanakan supervisi akademik kepada guru yang menjadi wilayah binaannnya tidak terlepas dari adanya tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut tentu harus diupayakan solusinya. Adapun solusi tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik

Kompetensi dan kualifikasi akademik yang dimiliki oleh pengawas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan mutu

³⁷Amran Mardjuki, Kepala SMPN 17 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 7 Mei 2014.

³⁸Djafar Sahila, Kepala SMPN 18 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 9 April 2014.

pembelajaran guru. Artinya bahwa kualifikasi akademik pengawas harus minimal magister dan sesuai dengan bidang keilmuannya sehingga seorang pengawas tidak diragukan lagi masalah kompetensi dan keilmuannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Abu Tholib mengungkapkan bahwa salah satu tantangan pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu adalah rendahnya kompetensi dan kualifikasi akademik yang dimilikinya. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah pemerintah kota Palu mulai menyekolahkan guru khusus di bidang kepengawasan.³⁹

Mencermati penjelasan informan tersebut maka dapat dipahami bahwa salah satu solusi mengatasi tantangan pengawas dalam pelaksanaan supervisi akademik guru Pendidikan Agama Islam adalah peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik dengan cara menyekolahkan guru untuk calon seorang pengawas sampai pada jenjang magister .

2. Rekrutman pengawas secara selektif

Rekrutman pengawas secara selektif sangat penting untuk dilakukan dalam upaya peningkatan kompetensi pengawas. Apabila perekrutan pengawas dilakukan secara selektif maka tentu akan menghasilkan seorang pengawas yang berkompeten. Selain itu, dalam perekrutan pengawas harus pula disesuaikan dengan regulasi yang ada.

Terkait dengan hal tersebut Kalsum Lawira mengungkapkan bahwa selama ini perekrutan pengawas yang dilakukan pada SMP Negeri di Kecamatan Palu utara Kota Palu pada umumnya dilakukan secara tidak selektif. Artinya bahwa

³⁹Abu Tholib, Kepala SMPN 22 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 2 April 2014.

pengangkatan pengawas tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan bidang keilmuannya dan hanya memiliki kualifikasi akademik sarjana sehingga menjadi salah satu tantangan pengawas dalam pelaksanaan supervisi akademik guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Palu. Oleh karena itu, salah satu solusi mengatasi faktor penghambat tersebut adalah pemerintah Kota Palu sudah merencanakan rekrutman pengawas secara selektif sesuai dengan spesifikasi keilmuannya.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis berkesimpulan bahwa salah satu solusi mengatasi tantangan pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam adalah rekrutman atau pengangkatan pengawas harus dilakukan secara selektif.



⁴⁰Kalsum Lawira, Kepala SMPN 16 Kota Palu, *Wawancara*, Palu, tanggal 4 Juni 2014.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Objektif pelaksanaan supervisi akademik pengawas pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari sikap dan perilkaunya ketika datang di sekolah melakukan kegiatan supervisi akademik, durasi waktunya hanya sebentar sehingga untuk membimbing guru secara maksimal sangat sulit.
2. Gambaran kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu, apabila dilihat dari aspek kemampuannya menguasai materi ajar, kemampuannya menguasai KI dan KD, kemampuan mengembangkan materi ajar, dan kemampuannya memanfaatkan teknologi informasi memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Ada yang sudah baik dan ada yang sudah cukup baik.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama khusus bidang Pendidikan Agama Islam, baik menyangkut perekrutan pengawas, pemerataan penempatan pengawas, maupun peningkatan frekuensi pembinaan pengawas.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi internal pengawas dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai pelaksanaan supervisi akademik pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri di Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

